

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Desember I Tahun 2024 No. 53

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif|Atraktif|Substantif



Fraksi PKS desak PPATK

Sita Aliran Dana Judol ke Bank dan e-Wallet

*Untuk Bantu Program
Makan Bergizi Gratis*

Habib Aboe Bakar Al Habsyi



Menjadikan Pancasila Ideologi Pemersatu

Mari kita jadikan Pancasila sebagai platform bersama (common platform) yang bersifat terbuka sehingga setiap orang merasa memiliki dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pancasila adalah falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai falsafah dan dasar negara, sila-sila Pancasila berperan menyatakan bangsa Indonesia. Sebaliknya, setiap narasi yang berpotensi memecah belah pasti bertentangan dengan Pancasila, sebut saja narasi paling Indonesia atau paling Pancasila dengan latar pemikiran eksklusivitas. Narasi tersebut tentu tidak tepat dan bisa kontraproduktif. Narasi tersebut tidak produktif karena bersifat agresif, represif, dan segregatif terhadap kelompok masyarakat lainnya yang distigmatisasi anti-NKRI atau anti-Pancasila. Secara filosofis narasi tersebut juga salah karena kita semua

sejatinya sedang berproses menjadi Indonesia (being Indonesia) maka tidak selayaknya mengklaim "paling Indonesia" atau "paling Pancasila" sambil menunjuk secara sadar atau tidak-pihak-pihak lain anti-NKRI atau anti-Pancasila.

Kita memerlukan pendekatan yang asertif, persuasif, dan dialog untuk menghasilkan kesepakatan (konsensus kebangsaan). Bukankah itu yang diajarkan dan selalu diingatkan para pendiri bangsa? Bung Karno, misalnya, tegas mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu, yang semestinya kita pahami agar Pancasila tidak dijadikan alat untuk mensegregasi masyarakat: saya Pancasila dan anda bukan. Saya

Pancasila dan anda anti-Pancasila.

Oleh karena itu, hendaknya setiap warga bangsa arif dalam menggunakan Pancasila sebagai "jargon", jangan sampai menimbulkan kesan segregasi atau alienasi di masyarakat. Klaim pancasilais atau NKRI tidak perlu dilakukan, apalagi ditunjukkan secara demonstratif karena akan menimbulkan reaksi sebaliknya. Apalagi jika hal itu dibumbui pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang, ujaran kebencian, dan klaim kebenaran di media sosial.

Mari kita jadikan Pancasila sebagai platform bersama (common platform) yang bersifat terbuka sehingga setiap orang

merasa memiliki dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kaum beragama, organisasi keagamaan, dai dan pengikutnya, merasa nyaman dalam beragama dan menyebarkan nilai-nilai agama karena memang sejalan dengan sila Pertama Pancasila. Pejuang keadilan merasa memiliki dasar kuat untuk bersikap kritis dalam menuntut keadilan karena memang itulah nilai utama Sila Kedua dan Kelima, dan seterusnya.

Pancasila harus jadi jembatan, bukan tembok pemisah. Pancasila merekatkan, bukan membelah. Tidak boleh ada yang disudutkan atas nama Pancasila, sementara yang lain merasa paling Pancasila.

Dengan cara pandang tersebut, kita akan menyediakan hati dan pikiran yang lapang bagi setiap perbedaan persepsi, aspirasi, aktualisasi kebangsaan di bumi Indonesia ini. Satu sikap mental yang menjadikan kita terbuka, merangkul, bekerja sama, dan bersinergi.

Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendiri atau beberapa kelompok saja. Bangsa ini harus dikelola secara bersama-sama oleh segenap rakyatnya dari latar belakang apapun dia berasal. Tugas sejarah kita adalah membangun sinergi dan kolaborasi seluas-luasnya untuk Indonesia, bukan melakukan segregasi dan polarisasi.

*Dari Catatan Dr. Salim: Titik Temu Kolaborasi Kebangsaan. ●

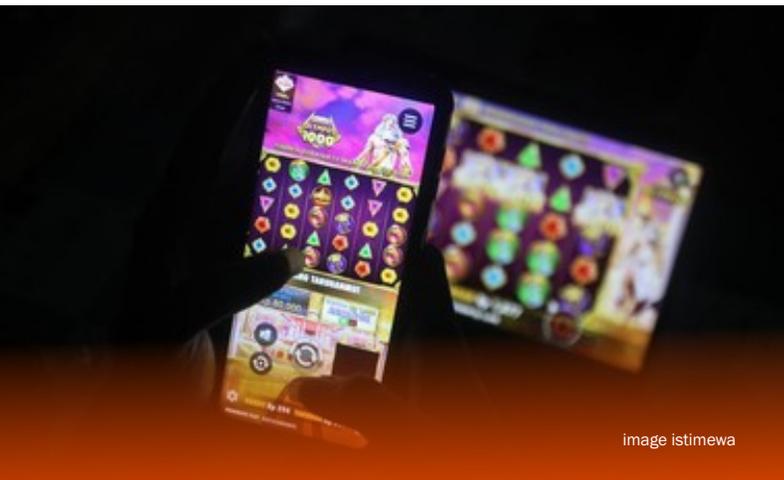


image istimewa

Bantu Program Makan Bergizi Gratis,

DPR Desak PPA TK Sita Rp 86 Triliun dari Judol yang Mengalir ke Bank dan E-Wallet

Jakarta (11/12) — Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy meminta lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

untuk menyita dana judi online (judol) yang mengalir di bank ataupun layanan e-wallet, khususnya untuk membantu program makan bergizi gratis.

Pasalnya, berdasar informasi dari Lembaga Center

For Banking Crisis (CBC), sepanjang tahun 2017-2024, mencatat jumlah pendapatan bank, layanan e-wallet dan operator seluler dari transaksi judol yang seharusnya dikembalikan ke negara sekitar Rp 86,3 triliun.

“Berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang PPA TK lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil pendapatan dari transaksi Judol di lembaga pembayaran, seperti bank, aplikasi e-wallet dan operator seluler yang diduga menjadi media pembayaran Judol,” kata Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Jika PPA TK tidak bisa mengambil uang dari transaksi Judol di bank, operator seluler, kata Ustaz Aboe Bakar, sapaan akrabnya, Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu).

“Isi Perppu adalah menambah kewenangan PPA TK, agar bisa mengambil dana transaksi Judol di lembaga sistem pembayaran resmi, seperti bank, aplikasi e-wallet atau operator seluler,” terang Ustaz Aboe Bakar.

Dengan pemberian kewenangan PPA TK itu, kata dia, akan mempercepat pemberantasan Judol yang sampai saat ini, belum mampu diatasi. Karena sistem pembayaran

tidak bisa offline dengan alasan akan merugikan nasabah lain yang bukan pelaku Judol.

“Adanya penarikan dana-dana itu akan memberikan efek jera kepada lembaga penyedia sistem pembayaran yang selama ini terkoneksi dengan merchant Judol,” terangnya.

Di mana, bank, e-wallet serta operator seluler yang memfasilitasi Judol, baik sengaja maupun tidak disengaja diancam penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar, berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2). Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp 25 juta bagi pelaku perjudian.

Selain itu, bank dapat kehilangan dana hasil Judol yang dianggap sebagai hak pemerintah, dan pendapatan dari aktivitas ilegal ini akan disita.

“Sanksi ini menegaskan bahwa keterlibatan dalam Judol tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa risiko serius bagi reputasi dan operasional bank,” paparnya.

Saat ini, berdasarkan data intelijen dari Kemenko Polhukam, jumlah masyarakat yang bermain Judol sepanjang 2024, mencapai 8,8 juta orang. Sebanyak 80 persen di antaranya adalah masyarakat menengah ke bawah.

“Jadi Judol merusak kehidupan masyarakat, baik

BERIKUTNYA >>>

Bantu Program Makan Bergizi Gratis, DPR Desak PPAK Sita Rp 86 Triliun dari Judol yang Mengalir ke Bank dan E-Wallet

« SEBELUMNYA

sosial ekonomi, kesehatan dan mental. Di sisi lain, ada yang menikmati Judol dari sistem transaksi yang melibatkan lembaga pembayaran seperti bank, dan e-wallet," imbuhnya.

Pandangan senada disampaikan Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri bahwa Judol sebagai fenomena global yang berkembang pesat di era digital, menjadi masalah yang mendesak diselesaikan pemerintah.

"Kemudahan sistem pembayaran Judol melalui bank, a-wallet dan operator seluler meluas karena lemahnya pengawasan perbankan oleh OJK dan pengawasan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia," kata Deni.

Dia bilang, saat ini, koneksi pembayaran melalui Application Programming Interface (API) dari perbankan atau e-wallet ke Penyedia Sistem Pembayaran (PJP), sangatlah mudah. Ini melemahkan E-KYC (Electronic Know your customer) dan E-KYB (Electronic Know Your business).

"Banyak perbankan dan layanan e-wallet yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu adanya koneksi dalam sistem pembayaran di internalnya terkoneksi merchan berbasis Judol," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, PJP yang mendapat izin operasi dari BI sesuai PBI No.22/23/PBI/2020 dan PJP yang mendapat izin PSE (penyelenggara system elektronik) PP No. 71/2019 dari Menkodigi, banyak yang berevolusi menjadi media transaksi pembayaran dan merchan Judol. Inilah yang menyebabkan Judol berkembang pesat.

"Perbankan, layanan a-wallet, operator seluler adalah media yang digunakan untuk pembayaran Judol secara digital. Nah, Layanan tersebut, mendapat untung atau cuan atau Fee pendapatan dari setiap transaksi Judol," kata Deni.

Berdasarkan data CBC, pendapatan bank dari Judol yang seharusnya dikembalikan ke negara sepanjang 2017-2024, sekitar Rp 70,6 triliun. Sedangkan pendapatan e-wallet dari Judol yang seharusnya

dikembalikan ke negara periode 2017-2024 sekitar Rp 11,5 triliun. Kemudian, pendapatan sejumlah operator seluler sepanjang 2017-2024 mencapai Rp 4,2 triliun. Kalau ditotal mencapai Rp 86,3 triliun.

"Selain itu, beberapa transaksi yang diblokir OJK senilai Rp 101 triliun yang melibatkan 6.400 rekening bahkan lebih, tersangkut Judol. Selanjutnya, harus menjadi deposito Pemerintah," kata Deni.

Seluruh dana yang tersangkut aktivitas Judol, kata Deni, maka sesuai hukum, uang tersebut disita oleh negara sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum.

"Agar penarikan dana melalui sistem pembayaran digital tidak terganggu sebaiknya ditarik secara bertahap selama setahun dan pajak yang telah dibayar atas hasil pendapatan tersebut diperhitungkan sebagai pajak yang bayar dimuka," katanya.

Selain itu, lanjut Deni, pendapatan bank, aplikasi e-wallet dan operator seluler dari transaksi Judol akan dimasukkan dalam APBN 2025. Dan dana tersebut, dapat digunakan untuk membantu program makan bergizi gratis.

"Proses penyitaan dilakukan melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dengan kesepakatan bahwa uang tersebut tetap diserahkan ke negara," pungkasnya.



Jika PPAK tidak bisa mengambil uang dari transaksi Judol di bank, operator seluler, Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu). Isi Perppu adalah menambah kewenangan PPAK, agar bisa mengambil dana transaksi Judol di lembaga sistem pembayaran resmi, seperti bank, aplikasi e-wallet atau operator seluler,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



fraksi.pks.id



fraksipksdpri



@fpksdpri



Fraksi PKS DPR RI



PKSTV DPR RI



Dr. H. Sukamta
Wakil Bidang Hukum

Drs. H. Adang Daradjatun
Wakil Bidang Kineja

Ismail Bachtiar, S.K.M., M.M.
Wakil Bendahara

Dr. H. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Bendahara

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledja Hanifa A., S.Si., M.PsI.T.
Sekretaris

Habib Idrus Salim Aijufri, Lc., M.B.A
Wakil Sekretaris

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Wakil Bidang Kesra

Amin, Ak., M.M.
Wakil Bidang Inbang

H. Ecky Awal Mucharam
Wakil Bidang Ekseku

Wakil Ketua Komisi I DPR FPKS Tegaskan Bahaya Judi Online Bagi Generasi Muda

Jakarta (05/12) --- Dalam sambutan Webinar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI 'Membangun Kesadaran Masyarakat dari Dampak Negatif Judi Online', Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahaya judi online bagi generasi muda dan masa depan Indonesia.

Sebagaimana data terbaru dimana total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp. 600 triliun pada tahun 2024. Bahkan dalam kuartal pertama 2024, transaksi mencapai Rp100 triliun.

"Diperkirakan ada sekitar 4 juta pemain judi online, mayoritas berusia 3050 tahun. Sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Lebih menyedihkan kita bahwa kecanduan Judi online meningkatkan kasusnya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, dengan lebih dari 197.000 kasus dilaporkan pada 2024,"

ungkap Kang Aher disela-sela memberikan sambutan .

Lebih lanjut, Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa ada beberapa dampak negatif dari judi online diantaranya yaitu dampak keuangan dengan kebangkrutan akibat kerugian besar; dampak sosial akan merusak hubungan keluarga dan masyarakat; dampak psikologi menyebabkan Ketergantungan, depresi, hingga bunuh diri; dan dampak hukum jelas melanggar aturan dan ancaman hukuman pidana.

"Tidak ada dalam sejarah-

nya judi membuat seseorang menjadi kaya atau sukses. Sungguh Judi online membawa dampak negatif yang sangat besar yaitu dampak keuangan akan semakin bangkrut, dampak sosial akan memburuk hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta dampak psikologi bisa menyebabkan depresi dan dampak hukum jelas bahwa judi online adalah pelanggaran hukum serta pidana," tegas Pelaksana Harian (PLH) Presiden DPP PKS ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini mengajak semua elemen baik pemerintahan maupun masyarakat ikut berperan dalam menangkal Judi Online yaitu peran orang tua bagaimana selalu mengawasi aktivitas online anak-anaknya; adapun peran Institusi dengan mengedukasi bahaya judi online; dan peran Komunitas dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online; serta peran Media dengan memberikan informasi yang mendidik dan tidak mempromosikan judi online

"Saya menghimbau dan mengajak kita semua khususnya generasi muda bahwa Judi online membawa dampak negatif yang luas bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan bebas judi online," demikian Tutup Kang Aher mengakhiri sambutan.



"Tidak ada dalam sejarahnya judi membuat seseorang menjadi kaya atau sukses.

Sungguh judi online membawa dampak negatif yang sangat besar yaitu dampak keuangan akan semakin bangkrut, dampak sosial akan memburuk hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta dampak psikologi bisa menyebabkan depresi dan dampak hukum jelas bahwa judi online adalah pelanggaran hukum serta pidana

Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image istimewa

Wakil Ketua FPKS Minta Kemenlu Proaktif Bantu Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta (03/12) --- Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, memberikan lima catatan penting kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait arah dan kebijakan diplomasi Indonesia. Dalam rapat bersama Kemenlu di DPR RI Senin (2/12/2024).

Sukamta mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan, namun menekankan perlunya perhatian yang lebih serius pada sejumlah aspek untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

"Kami memberikan apresiasi terhadap langkah diplomasi politik luar negeri Presiden Prabowo yang menunjukkan optimisme dan kepercayaan diri. Namun, terdapat lima catatan penting yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo dan Kemenlu," ujar Sukamta.

Pertama, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyoroti anggaran diplomasi dalam APBN 2025 yang dinilai masih sangat kecil, yakni sebesar Rp 8 triliun.

"Jika dibandingkan dengan negara seperti Australia, yang mengalokasikan setengah persen dari APBN-nya untuk diplomasi, Indonesia membutuhkan sekitar Rp20 triliun untuk mencapai tingkat yang setara. Harapannya, Kemenlu dapat memperoleh alokasi anggaran

yang lebih signifikan, mengingat perhatian Presiden terhadap diplomasi dan politik luar negeri" ujar Sukamta.

Kedua, Sukamta juga menyambut baik inisiatif MEDI yang diusung oleh Kemenlu, namun menekankan pentingnya rincian anggaran yang lebih jelas untuk mendukung langkah ini. Ia juga menyoroti perlunya restrukturisasi infrastruktur diplomasi, termasuk pengelolaan aset sumber daya manusia.

"Restrukturisasi Kemenlu sudah mendesak, terutama untuk menciptakan diplomat dengan keahlian spesifik di wilayah tertentu, seperti Timur Tengah dan ASEAN," jelasnya.

Catatan ketiga, mengenai isu luar negeri, Doktor Lulusan Inggris ini mempertanyakan konsep 'Middle Power' yang belum jelas secara definisi dan kebijakan yang akan dilakukan.

"Sebagai salah satu kekuatan diplomasi global, Indonesia sering disebut sebagai middle power. Namun,

Wakil Ketua FPKS Minta Kemenlu Proaktif Bantu Perjuangan Kemerdekaan Palestina

« SEBELUMNYA

konsep ini perlu dijelaskan lebih rinci. Apakah maksudnya sebagai negara penengah atau mediator konflik global? Penekanan pada peran ini penting untuk memperkuat sentralitas ASEAN dan menjembatani rivalitas negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok,” tambahnya.

Isu luar negeri lain sebagai catatan keempat yang menjadi perhatian rakyat Indonesia yaitu mengenai area disputed overlap di Laut Cina Selatan, Sukamta mengingatkan potensi disouté di masa depan.

“Tiongkok belum pernah memberikan koordinat konkret terkait klaim mereka.

Sementara itu, undang-undang Indonesia juga tidak menyebut Tiongkok sebagai negara berbatasan langsung. Posisi Indonesia harus tegas agar tidak dimanfaatkan pihak lain,” tegasnya.

Terakhir, Sukamta menekankan pentingnya Indonesia berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi konflik Israel-Palestina.

“Indonesia harus tetap menolak hubungan diplomatik dengan Israel dan proaktif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Bahkan jika terdapat tawaran seperti Abraham Accords atau model perjanjian lain yang memberikan keuntungan besar kepada Indonesia namun dengan syarat Indonesia menjalin hubungan dengan Israel. Sikap tegas ini sejalan dengan amanah konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia juga harus memainkan peran lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina,” ungkap Sukamta.

Lima catatan penting ini, Sukamta berharap Kemenlu dapat memperkuat strategi diplomasi yang lebih progresif dan efektif dalam menghadapi dinamika global.



“Sebagai salah satu kekuatan diplomasi global, Indonesia sering disebut sebagai middle power. Namun, konsep ini perlu dijelaskan lebih rinci. Apakah maksudnya sebagai negara penengah atau mediator konflik global? Penekanan pada peran ini penting untuk memperkuat sentralitas ASEAN dan menjembatani rivalitas negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok,”

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI



Image: ist/mewa



image istimewa

Dukung Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, Aleg PKS: Jangan Berhenti Sampai PTSL Saja

Jakarta (04/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menghadiri dan membuka kegiatan sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, di Hotel Horison Kertajati, Majalengka pada Senin, (02/12/2024).

Menurut Ateng, program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam sambutan pembukaannya, Ateng Sutisna menyatakan bahwa tujuan utama dari sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN adalah untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat.

"Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan hak-hak mereka atas tanah," ungkapnya.

Selanjutnya, imbuh Ateng, Mempermudah Proses Pendaftaran Tanah. Program ini dirancang untuk mengurangi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat mendaftarkan tanah mereka.

"Mendukung Kepastian Hukum Atas Tanah. Dengan mendaftarkan tanah secara sistematis, diharapkan setiap bidang tanah akan memiliki kepastian hukum yang jelas, serta mengurangi sengketa dan konflik pertanahan di masyarakat," ungkap Ateng.

Ateng menambahkan berikutnya adalah bagaimana kita mendorong Partisipasi Masyarakat.

"Program strategis ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam pengelolaan sumber daya tanah di daerah mereka," terangnya.

Lebih lanjut, Ateng menambahkan, setidaknya terdapat 3 (tiga) program strategis Kementerian ATR/BPN, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis

BERIKUTNYA >>>

Dukung Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, Aleg PKS: Jangan Berhenti Sampai PTSL Saja

« SEBELUMNYA

Lengkap (PTSL).

"Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Kami berharap partisipasi aktif dari semua pihak agar target pengukuran dan sertifikasi tanah dapat tercapai secara optimal," pungkasnya.

Ateng melanjutkan Reforma Agraria. Melalui program strategis ini, Kementerian

ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tanah dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap lahan pertanian dan pemukiman.

"Penggunaan Teknologi Informasi. Dalam era digital saat ini, kami mengajak semua pihak untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanian. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat,"



papar Ateng.

Anggota Komisi II asal Dapil SMS itu juga mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka yang sangat progresif merealisasikan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat melalui program PTSL.

Namun Ateng juga mengingatkan bahwa program strategis lainnya, terutama reforma agraria melalui redistribusi tanah kepada masyarakat juga perlu dilakukan akselerasinya.

"Saya mengharapkan program reforma agraria berupa redistribusi lahan kepada masyarakat setempat atas lahan-lahan HGU yang 'terlantar' atau yang sudah selesai masa HGU-nya juga menjadi perhatian dari Kantor Pertanahan. Salah satunya, seperti lahan HGU di desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, yang sudah terbengkalai selama ini", ujarnya.

Menurutnya capaian kinerja Kantor Pertanahan Majalengka selama ini yang sangat baik akan lebih baik lagi jika program strategis reforma agraria juga memperoleh porsi perhatian lebih ke depannya.

Dalam akhir sambutannya tersebut, Ateng juga mengharapkan kerjasama dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Majalengka dapat ditingkatkan agar ketiga program strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Majalengka menjadi yang terbaik capaiannya.



Dalam era digital saat ini, kami mengajak semua pihak untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanian. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat,"

Ir. H. ATENG SUTISNA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX



Sosialisasi PTSL, Rahmat Saleh: Sertifikasi Tanah Tingkatkan Nilai Ekonomi Aset

Padang (04/12) — Ratusan warga dari berbagai daerah di Sumatera Barat menghadiri sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlangsung di Axana Hotel, Kota Padang, Sabtu (30/11/2024).

Kegiatan ini digelar oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, bekerja sama dengan Kantor Wilayah ATR/ BPN Sumbar.

Rahmat Saleh menjelaskan berbagai persoalan terkait pengurusan sertifikat tanah, baik dalam skala kecil maupun besar, seringkali dilaporkan ke Komisi II.

"Sebagai contoh, permasalahan konsesi lahan HGU yang dimiliki sejumlah perusahaan sawit, tambang, hingga masalah penyerobotan lahan, itu masuk ke Komisi II," ujar Rahmat Saleh.

Dia menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini

agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah urgensi pengurusan sertifikat tanah.

"Ketika tanah kita tidak bersertifikat, pihak ketiga, baik pemerintah maupun perbankan, tidak mengakui itu sebagai aset yang bernilai ekonomis," jelasnya.

Sebagai ilustrasi, Rahmat Saleh mencontohkan masyarakat yang memiliki kebun atau lahan sering kali menemui hambatan ketika melaporkan aset tersebut ke LHKPN.

"Jika tanah tidak memiliki dokumen kepemilikan sah,

laporan tersebut bisa ditolak. Namun, jika tanah sudah disertifikatkan, aset itu diakui sebagai kekayaan baik oleh pemerintah maupun perbankan," ungkapnya.

Rahmat juga menyoroti banyaknya aset masyarakat yang masih tercatat sebagai tanah ulayat atau atas nama anak kemenakan.

Dengan demikian, aset itu seringkali dianggap tidak produktif karena tidak terdara sebagai kekayaan sah yang didata oleh negara.

Dia menambahkan di Sumatera Barat terdapat tantangan khusus dalam pengurusan sertifikat tanah, seperti sistem kepemilikan lahan yang melibatkan konsep pusako tinggi dan pusako randah.

"Hal ini sering menjadi alasan rendahnya minat masyarakat Sumbar untuk mengurus sertifikat tanah," katanya.

Ada pula kekhawatiran di kalangan niniak mamak dan kemenakan bahwa sertifikasi tanah akan mempermudah proses penjualan atau penggadaian.

"Namun setelah berdiskusi dengan Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar, nyatanya tidak semudah itu. Ada aturan yang harus diikuti," jelasnya.

Rahmat menegaskan perlunya bimbingan teknis yang melibatkan niniak mamak dan pemangku kebijakan lain untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi



di Sumatera Barat terdapat tantangan khusus dalam pengurusan sertifikat tanah, seperti sistem kepemilikan lahan yang melibatkan konsep pusako tinggi dan pusako randah. Hal ini sering menjadi alasan rendahnya minat masyarakat Sumbar untuk mengurus sertifikat tanah,

H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.I.P

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

tanah.

Menurutnya, sosialisasi ini membahas isu-isu substantif, bukan sekadar seremonial, agar masyarakat memahami alur pengurusan sertifikat tanah, khususnya melalui program PTSL.

Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar, Sri Puspita Dewi, menyampaikan

bahwa program PTSL merupakan langkah strategis dari Kementerian ATR/BPN.

"Karena di Sumbar banyak lahan berstatus tanah ulayat, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang status tanah mereka," tuturnya.



Habib Aboe: Tingkatkan Pembinaan Mental dan Spiritual di Tubuh Polri

Jakarta (09/12) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi menanggapi rentetan kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian dalam waktu kurang dari sebulan terakhir.

“Kejadiannya beruntun, mulai dari insiden polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, kemudian penembakan siswa SMK di Semarang, kasus penembakan warga di Bangka Belitung, hingga peristiwa tragis di Cileungsi, di mana seorang polisi tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Itu semua kan jadi atensi publik, membuat pertanyaan kenapa bisa terjadi seperti itu”, terang Sekjend DPP PKS tersebut.

Lebih lanjut Aboe Bakar menyampaikan bahwa kejadian-kejadian ini tidak hanya mengundang keprihatinan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait kondisi mental, spiritual, dan integritas anggota kepolisian.

“Sebagai salah satu institusi yang diamanahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri seharusnya mencerminkan disiplin, ketenangan, dan tanggung jawab tinggi dalam setiap tindakannya”, papar Wakil Ketua MKD tersebut.

Aboe Bakar menyarankan agar pembinaan mental dan spiritual bagi seluruh personel Polri ditingkatkan secara

signifikan.

“Pembinaan ini penting untuk memastikan setiap anggota memiliki kestabilan emosi, kedewasaan sikap, dan nilai-nilai moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga beban berat dari tugas yang diemban akan dapat dikelola dengan baik”, terangnya lebih lanjut.

“Program pembinaan spiritual juga perlu diperkuat, termasuk melalui pendekatan agama dan pembentukan

karakter yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat”, lanjut Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel II tersebut.

Aboe Bakar berharap Polri segera melakukan pendalaman terhadap rentetan kasus kekerasan yang terjadi.

“Kepolisian bukan sekadar institusi penegak hukum, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan kasus-kasus yang terjadi, Polri harus melakukan introspeksi mendalam dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem internalnya, terutama yang berkaitan dengan pembinaan personel”, tukasnya.

“Kepolisian bukan sekadar institusi penegak hukum, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan kasus-kasus yang terjadi, Polri harus melakukan introspeksi mendalam dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem internalnya, terutama yang berkaitan dengan pembinaan personel”,

**HABIB ABOE
BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI



image istimewa

Soal SIM Seumur Hidup, Aleg PKS: Bentuk Keberpihakan pada Rakyat, Namun Tetap Perlu Uji Berkala

Jakarta (09/12) -- Anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Surahman Hidayat mengapresiasi usulan dari Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding tentang permintaan Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup

saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Jakarta, Rabu (04/12/2024).

"Saya mengapresiasi anggota DPR RI yang mengusulkan SIM berlaku Seumur Hidup hal ini sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan rakyat, terutama pengendara sepeda motor dari kelas menengah ke bawah yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi utama dalam mencari nafkah," ujar Surahman.

Lebih lanjut Surahman menegaskan, Akan tetapi unsur keselamatan berkendara juga

lebih prioritas sehingga uji kompetensi berkala tetap diperlukan sebagaimana menjadi pertimbangan utama pihak kepolisian dan para pakar untuk tetap mempertahankan uji berkala tersebut.

"Oleh karena itu perlu formulasi jalan tengah atau win-win solution di mana uji kompetensi berkala tetap ada tetapi negara dalam ini harus hadir, yaitu membantu meringankan biaya uji kompetensi berkala tersebut untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk biaya subsidi," tutur Surahman

"Perlu formulasi jalan tengah atau win-win solution di mana uji kompetensi berkala tetap ada, tetapi negara dalam ini harus hadir, yaitu membantu meringankan biaya uji kompetensi berkala tersebut untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk biaya subsidi,"

**Dr. KH. SURAHMAN
HIDAYAT, M.A.**

Anggota Komisi III DPR RI



Jadi Narasum LBH Masyarakat,

Adang Daradjatun: Pentingnya Peran DPR RI Dalam Reformasi Kebijakan Narkotika

Jakarta (05/12) --- Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menjadi narasumber dalam acara Dialog Kebijakan bertajuk 'Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia' yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat (LBHM) pada Rabu (04/12/2024).

Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang membahas strategi komprehensif dalam reformasi kebijakan narkotika di Indonesia.

Dalam paparannya, Adang Daradjatun menyoroti pentingnya peran DPR RI dalam reformasi arah kebijakan narkotika.

"Peran DPR mencakup tiga aspek utama yakni Legislasi atau Penyusunan dan revisi Undang-Undang Narkotika yang relevan dengan kebutuhan zaman," ungkapnya.

Kedua, imbuh Adang, Pengawasan atau mengawasi implementasi kebijakan narkotika secara menyeluruh. "Ketiga yaitu Anggaran.

Mengalokasikan anggaran yang mendukung program-program pengendalian dan penanganan narkotika," ungkapnya.

Menurut Adang, reformasi kebijakan narkotika harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik.

"Kelembagaan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN)

perlu diperkuat, peran aktif masyarakat dan keluarga harus ditingkatkan, serta hukuman terhadap produsen, bandar, dan jaringan pengedar narkotika harus diperberat," ujarnya.

Lebih lanjut, Adang menegaskan bahwa kebijakan narkotika berbasis kesehatan sangat penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk narkotika.

"Pendekatan berbasis kesehatan dapat mendukung

pemulihan pengguna narkotika dan mengurangi dampak buruk yang mereka alami. Namun, upaya ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar efektif dan berkelanjutan," tambahnya.

Terkait Harm Reduction (Pengurangan Dampak Buruk), Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga berkomentar bahwa Tujuan Harm Reduction diantaranya adalah Mencegah Penyakit menular dan efek buruk lainnya, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan akses ke rehabilitasi dan mengurangi kriminalitas.

Acara ini menegaskan urgensi reformasi kebijakan narkotika di Indonesia dengan mendorong langkah-langkah strategis, baik di level regulasi, pengawasan, maupun kolaborasi masyarakat.

Adang Daradjatun berharap diskusi ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman narkotika.

"Pendekatan berbasis kesehatan dapat mendukung pemulihan pengguna narkotika dan mengurangi dampak buruk yang mereka alami. Namun, upaya ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar efektif dan berkelanjutan,"

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II



image istimewa

Anggota FPKS: Pupuk Subsidi Harus Terpenuhi 100% untuk Petani

Jakarta (04/12) --- Pemerintah Presiden Prabowo agar pupuk subsidi langsung ke gapoktan dengan mekanisme yang sederhana serta mudah. Kebutuhan nasional pupuk subsidi urea saat ini tersedia 7,5 Juta ton sesuai anggaran yang di sediakan oleh negara.

Saat ini pupuk subsidi tersedia di kios resmi dengan harga sesuai HET di kios sebesar 112.500.

"Swasembada pangan kuncinya 62% ada di ketersediaan pupuk subsidi, sisanya ada di pengairan dan jaringan irigasi," kata Riyono Anggota komisi IV DPR RI.

Program swasembada pangan dengan target kenaikan produksi beras 32,83 juta ton Jagung 16,68 juta ton, cabai 3,08 juta ton, daging sapi 339,41 ribu ton, daging ayam 4,34 juta ton dengan anggaran

29,37 Trilyun.

"Presiden mentargetkan swasembada pangan dalam waktu 3 tahun, gak boleh main-main dengan pupuk untuk petani. Isu kelangkaan pupuk gak boleh ada lagi," tambah Riyono.

Perlu penguatan dan pengokohan dalam bentuk pompanisasi, cetak lahan 1.5 juta Ha, rekrutmen petani milineal harus tetap di jalankan.

"Idealnya alokasi pupuk menjadi fix budget setiap tahun dengan target terpenuhi 100% demi wujudkan swasembada pangan" tutup Riyono

Perlu penguatan dan pengokohan dalam bentuk pompanisasi, cetak lahan 1.5 juta Ha, rekrutmen petani milineal harus tetap di jalankan. Idealnya alokasi pupuk menjadi fix budget setiap tahun dengan target terpenuhi 100% demi wujudkan swasembada pangan"

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VII



image istimewa

Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Saadiah Uluputty Dorong Digitalisasi dan Penyederhanaan Regulasi

Jakarta (05/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pupuk bersubsidi untuk menjamin manfaatnya tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen vital untuk mendukung produktivitas petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

"Petani kecil sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil panen. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan seperti data penerima yang tidak akurat, distribusi yang tidak efisien, hingga regulasi yang tumpang tindih," ujar Saadiah dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (04/12/2024).

Saadiah menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi sebagai solusi untuk memperbaiki rantai distribusi dan meminimalkan penyimpanan.

Dengan teknologi digital, pemerintah dapat memantau penyaluran pupuk secara real-time, memastikan transparansi, serta mempermudah petani dalam mengakses pupuk.

"Digitalisasi adalah langkah maju yang harus diambil segera. Sistem berbasis

teknologi dapat memastikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan data valid. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dengan adanya rekam jejak digital," jelasnya.

Selain digitalisasi, Saadiah menilai regulasi terkait pupuk bersubsidi sering kali menjadi kendala bagi petani. Banyak aturan yang dianggap terlalu kompleks, sehingga memerlukan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tepat waktu.

"Penyederhanaan regulasi sangat mendesak dilakukan. Kebijakan yang tumpang tindih hanya akan memperlambat akses petani terhadap pupuk, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Regulasi harus dirancang sederhana namun tetap akuntabel," katanya.

Menurut Saadiah, pemerintah perlu menyusun regulasi yang berorientasi pada kebutuhan petani di lapangan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai

Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Saadiah Uluputty Dorong Digitalisasi dan Penyederhanaan Regulasi

« SEBELUMNYA

dari petani, distributor, hingga pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Saadiah menekankan pentingnya validasi data petani sebagai langkah awal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Data yang akurat akan memastikan



alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Validasi data harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi aktif bagi petani untuk memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” ungkap Saadiah.

Anggota DPR RI Dapil Maluku tersebut menegaskan bahwa Fraksi PKS berkomitmen untuk mengawal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini agar memberikan manfaat nyata bagi petani.

“Kami akan terus mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi digitalisasi, penyederhanaan regulasi, dan evaluasi kebijakan pupuk bersubsidi. Semua ini demi memastikan petani Indonesia sejahtera,” pungkasnya.

Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, menurut Saadiah, tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan pencapaian ketahanan pangan nasional.



“Digitalisasi adalah langkah maju yang harus diambil segera. Sistem berbasis teknologi dapat memastikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai dengan data valid. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dengan adanya rekam jejak digital,”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI



AME 2024
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Keadilan Berkeadilan Subsidiarif

NETIZEN AWARD

Selamat & Sukses
dr. Gamal

Atas raihan **Asia's Top Outstanding Netizen Marketer of The Year** dari Xin Jack Yao, (President Asia Marketing Federation from China) dan Roger Wang, (1st Vice President Asia Marketing Federation from Singapore).
Semoga Menjadi Inspirasi bagi Bangsa.

Cuaca Buruk, Aleg PKS minta ASDP Perpanjang Masa Berlaku Tiket Kendaraan dan Penumpang di Pelabuhan Merak

Jakarta (03/12) -- Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta PT ASDP selaku operator pelabuhan Merak-Bakauheni

untuk memperpanjang masa berlaku tiket penyeberangan dan tidak menghanguskan tiket kendaraan dan penumpang yang tertunda penyeberangannya karena ditutupnya Pelabuhan Merak akibat cuaca buruk.

"BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tentang cuaca buruk di Pelabuhan Merak yang berbahaya untuk pelayaran dan PT ASDP selaku operator sudah menutup sementara Pelabuhan demi keselamatan pelayaran. Penutupan ini tentu berdampak pada tiket yang sudah dibeli kendaraan

penumpang. Karena itu, kami minta PT ASDP memperpanjang masa berlaku tiketnya dan tidak menghanguskan tiket penyeberangan kendaraan dan penumpang yang sudah dibeli untuk penyeberangan tanggal 3 karena bukan karena keterlambatan mereka, tapi karena penutupan operasional Pelabuhan. Jadi, PT ASDP tetap harus memberangkatkan mereka meski tiket mereka sudah hangus karena tertunda penyeberangannya," kata Yanuar, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) VIII

meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Seperti diketahui, BMKG mengeluarkan peringatan dini pada pukul 10.30 WIB terkait angin kencang berkecepatan 25–32 knots dari arah barat daya, serta gelombang tinggi mencapai 2,0–3,0 meter.

Dalam situsnya, BMKG menyatakan peringatan cuaca buruk di Pelabuhan Merak-Bakauheni tersebut berlaku dari tanggal 3 Desember 2024 sampai 4 Desember 2024 pukul 19.00.

Untuk mempercepat penguraian kemacetan di Pelabuhan Merak akibat penutupan sementara Pelabuhan, Yanuar menyarankan agar PT ASDP segera mengerahkan kapal-kapal besar untuk mengangkut ratusan kendaraan yang tertahan.

"Jika BMKG Sudah mencabut peringatan cuaca buruk dan penyeberangan sudah aman, saya minta PT ASDP untuk mengerahkan kapal-kapal besar untuk mengangkut kendaraan yang tertahan supaya kemacetan segera terurai," kata Yanuar.

Cuaca buruk yang melanda Selat Sunda tersebut mengganggu proses bongkar muat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Pengguna jasa, terutama kendaraan besar seperti truk, diminta menunda perjalanan atau beristirahat di rest area.

Untuk menghindari kemacetan, Polda Banten mengimbau masyarakat untuk meng-



"Jika BMKG Sudah mencabut peringatan cuaca buruk dan penyeberangan sudah aman, saya minta PT ASDP untuk mengerahkan kapal-kapal besar untuk mengangkut kendaraan yang tertahan supaya kemacetan segera terurai,"

H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.

Anggota Komisi V DPR RI

hindari antrean Panjang dan sementara waktu menepi dan beristirahat di rest area Km 43 atau Km 68 (Tol Tangerang-Merak arah Pelabuhan).

Akibat penutupan sementara Pelabuhan Merak-Bakauheni, ratusan kendaraan

antre hingga exit tol merak menunggu masuk ke Pelabuhan. Untuk mengurai kemacetan, Polda Banten memberlakukan contra flow agar tak mengganggu arus lalu lintas dari jalur arteri.



Aleg PKS: Pemerintah Harus Lebih Siap Menghadapi Cuaca Ekstrem Selama Libur Nataru

Surabaya (10/12) — Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Hal itu disampaikan Abdul Hadi dalam dalam kunjungan kerja Komisi V terkait Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Nataru 2024/2025 di Provinsi Jawa Timur.

Abdul Hadi menyoroti perlunya kewaspadaan ekstra terhadap potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia, termasuk risiko bencana tanah longsor.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait harus mengambil langkah antisipasi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan ini, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kepala BMKG telah mengingatkan bahwa Desember 2024 merupakan puncak musim hujan, ditambah dengan

fenomena La Niña yang meningkatkan potensi curah hujan hingga 20-40%. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi V beberapa waktu yang lalu," ujar Abdul Hadi.

Abdul Hadi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesiapan menghadapi libur Nataru tahun ini, yang diprediksi akan melibatkan pergerakan hingga 110 juta orang secara nasional. Ia menghimbau pemerintah melakukan langkah strategis antara lain adanya penguatan sistem peringatan dini.

"Kami menghimbau agar Informasi cuaca ekstrem harus tersosialisasikan secara efektif kepada masyarakat, baik melalui aplikasi daring maupun rambu-rambu jalan. Koordinasi dengan BMKG, Korlantas, dan

lembaga terkait sangat penting untuk memberikan peringatan dini kepada pengendara. Selain itu pemerintah harus memastikan kemandirian jalan secara maksimal, menambah fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dan menyiapkan peralatan tanggap bencana, seperti alat berat di lokasi rawan longsor dan banjir. Saat ini, ada 550 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi, dan perlengkapan penanganan darurat harus siap di lokasi tersebut," ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.

Abdul Hadi juga menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi seperti Kemenhub, KemenPU, BMKG, Basmas, dan Korlantas untuk memastikan pelaksanaan SOP tanggap bencana dan pelayanan transportasi yang efektif.

"Kami juga meminta agar regulasi transportasi diperketat, termasuk penghentian arus lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan saat cuaca buruk, untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang sering terjadi akibat curah hujan tinggi," jelasnya

Dalam kesempatan itu



"Kepala BMKG telah mengingatkan bahwa Desember 2024 merupakan puncak musim hujan, ditambah dengan fenomena La Niña yang meningkatkan potensi curah hujan hingga 20-40%. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi V beberapa waktu yang lalu,"

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

juga Abdul Hadi berharap ada perhatian khusus untuk Pulau Lombok, dengan topografinya yang berbukit, sangat rentan terhadap tanah longsor.

Abdul Hadi meminta pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian

khusus pada titik-titik rawan bencana di Lombok Timur, Lombok Barat, dan wilayah lainnya.

"Kesiapan infrastruktur, alat berat, dan dukungan logistik harus dipastikan optimal untuk melindungi masyarakat," tambahnya.



Raker Kesiapan Nataru,

Anggota FPKS Minta Kemenhub Cabut Ijin Bus Tidak Laik Jalan

Jakarta (05/12) — Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kepala Korlantas Polri.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1, Reni Astuti, menyortir sejumlah isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat selama libur panjang tersebut.

Reni menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap angkutan transportasi, terutama angkutan pariwisata.

Ia meminta Kementerian Perhubungan bertindak tegas terhadap kendaraan yang tidak lolos uji laik atau tidak memenuhi standar kelengkapan.

"Angkutan transportasi yang tidak memenuhi standar harus segera ditindak tegas, kalau perlu izinnya dicabut. Ini penting untuk menjaga keselamatan masyarakat selama libur Nataru," tegas Reni.

Politisi asal Surabaya itu juga mendorong PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk memberikan keringanan atau penyesuaian tarif selama masa libur Nataru.

"Saya sangat berharap kepada KAI, dapat memberikan keringanan biaya selama nataru. Ini akan menjadi kabar baik bagi masyarakat di penghujung

tahun 2024 dan membantu mereka yang ingin merayakan liburan dengan nyaman dan terjangkau," ujar Reni.

Reni juga memberikan perhatian khusus pada konektivitas jalan menuju daerah wisata yang diprediksi akan menjadi tujuan utama masyarakat selama liburan. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum memastikan jalan-jalan tersebut dalam kondisi prima dan bebas dari hambatan.

"Libur Nataru biasanya menjadi momen masyarakat berbondong-bondong ke destinasi wisata. Konektivitas jalan harus dipastikan aman dan lancar agar masyarakat dapat menikmati liburannya tanpa kendala," katanya.

Selain itu, Reni mendorong seluruh operator transportasi untuk meningkatkan on-time performance layanan mereka.

"Kenyamanan dan ketepatan waktu adalah prioritas yang harus dijaga, terutama di masa libur Nataru yang padat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi," tambahnya.

Reni berharap pemerintah dan semua pihak terkait dapat berkolaborasi memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran selama libur Nataru 2025.

"Momen ini adalah waktu yang dinanti masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan mereka harus menjadi prioritas



"Saya sangat berharap kepada KAI, dapat memberikan keringanan biaya selama nataru. Ini akan menjadi kabar baik bagi masyarakat di penghujung tahun 2024 dan membantu mereka yang ingin merayakan liburan dengan nyaman dan terjangkau,"

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI

utama," pungkasnya.

Rapat ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memaksimalkan kesiapan

infrastruktur dan transportasi nasional dalam menyambut libur akhir tahun.



image istimewa

RDP Bersama Pertamina, Ghufuran Sampaikan Aspirasi Nelayan Aceh

Jakarta (04/12) --- Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pertamina (Persero) beserta Subholding pada Selasa (3/12/2024).

Rapat tersebut dihadiri langsung Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran direksi Subholding.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ghufuran Zainal Abidin, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Aceh 1, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kemudahan akses BBM bersubsidi, khususnya untuk nelayan di Aceh.

“Saya ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat, khususnya di Aceh, karena saya berasal dari daerah pemilihan Aceh. Seperti yang mungkin diketahui bahwa sejak tahun 2023, Aceh telah menerapkan sistem pembelian BBM bersubsidi dengan barcode. Memang, pada awal penerapan sistem ini terjadi sedikit kekacauan, namun Alhamdulillah, masyarakat Aceh sudah terbiasa dengan barcode ini,” ujar Ghufuran dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini.

Ghufuran menyampaikan bahwa pada saat Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh – Sumut 2024 lalu, masyarakat menerima kebijakan penggunaan barcode dengan ikhlas.

“Kendaraan yang menggunakan stiker PON tidak perlu menggunakan barcode, sementara kendaraan yang tidak ada stiker PON tetap menggunakan barcode,” ujar Ghufuran.

Namun, Ghufuran mengungkapkan, meskipun barcode diterapkan untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, kenyataannya masih ada masalah di lapangan. Khususnya di kawasan barat selatan Aceh, antrian panjang untuk pembelian BBM bersubsidi, terutama solar, masih terjadi.

Berdasarkan data 2024, Aceh sebenarnya mendapatkan alokasi BBM bersubsidi yang cukup besar pada 2024, yakni 1.000.882 kiloliter (KL). Namun, jika tidak ada mafia yang menyalahgunakan, pasokan BBM subsidi kepada masyarakat sesuai dengan rencana pemerintah seharusnya bisa terpenuhi.

Namun, di lapangan, terutama untuk solar, situasinya tidak seindah yang dilaporkan oleh Direktur Utama Pertamina dalam RDP.

Ghufuran juga menambahkan

BERIKUTNYA >>>

RDP Bersama Pertamina, Ghufran Sampaikan Aspirasi Nelayan Aceh

« SEBELUMNYA

kan bahwa kualitas BBM subsidi yang diragukan menjadi keluhan masyarakat, dan untuk mendapatkan BBM subsidi, khususnya di daerah pesisir, sangat sulit.

“Masyarakat nelayan yang paling merasakannya. Saya menyampaikan aspirasi mereka, karena profesi nelayan sangat

bergantung pada BBM solar subsidi. Harapan masyarakat adalah agar ada SPBU yang lebih dekat dengan pemukiman nelayan. Tanpa solar, nelayan tidak bisa melaut. Jadi, mohon agar ini diperhatikan dengan serius,” tegas Ghufran.

Lebih lanjut, Ghufran berharap bahwa meskipun Pertamina berencana melakukan perubahan besar-

besaran, masyarakat tetap dapat didampingi dalam memenuhi kebutuhan BBM subsidi mereka.

“Kami berharap agar pasokan BBM subsidi ke Aceh lancar dan terpenuhi, tanpa adanya mafia yang bermain. Agen LPG 3 kg di lapangan juga perlu ditegaskan, agar masyarakat dapat membeli dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Banyak kios yang menjual dengan harga di atas HET,” tambahnya.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang menjabat sejak 4 November 2024 menggantikan Nicke Widayati, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VI.

“Saya secara pribadi menyampaikan penghormatan dan terima kasih setinggi-tingginya atas apa yang disampaikan Komisi VI. Hal ini semakin memberikan dorongan semangat bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Pertamina, karena pada akhirnya, Pertamina akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Terkait dengan subsidi tepat sasaran, Simon juga menjelaskan bahwa Pertamina merupakan bagian dari Tim Satgas yang dipimpin oleh Kementerian ESDM untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan dengan baik.



“Kami berharap agar pasokan BBM subsidi ke Aceh lancar dan terpenuhi, tanpa adanya mafia yang bermain. Agen LPG 3 kg di lapangan juga perlu ditegaskan, agar masyarakat dapat membeli dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Banyak kios yang menjual dengan harga di atas HET,”

GHUFRAN

Anggota Komisi VI DPR RI





Image istimewa

Tifatul Dukung Menperin soal Apple Investasi Pabrik Rp 16 T: Ahlan Wa Sahlan

Jakarta (10/12) -- Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, mendukung rencana Apple investasi di Indonesia senilai Rp 16 triliun

seperti yang disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia menilai rencana Apple ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia.

"Bagus, dong. Lah kita belum punya teknologi secanggih itu, dan uang sebanyak itu. Ada investor yang bangun (pabrik), nyera tenaga kerja, apalagi pakai TKDN (tenaga kerja da-lam negeri) kita. Ahlan wa sah-lan," kata Tifatul saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

Selain itu, Tifatul menyinggung Apple yang punya standar teknologi tinggi dan canggih. Dia juga menyinggung produk Apple yang baik di Indonesia.

"Menurut saya bagus ya.

Apple ini kan perusahaan dengan brand yang sudah memiliki standar hi-tech yang tinggi dan teknologi yang canggih. Bagi para pengguna HP dan gadget, laptop Apple ini menempati ranking paling atas. Dengan operating system-nya yang unik dan handal serta kualitas hardware-nya juga bandel. Nggak gampang macet," ucapnya.

Kemudian, Tifatul juga menyebut kehadiran Apple di RI positif untuk anak-anak muda. Menurutnya, anak muda Indonesia bisa belajar banyak dari Apple.

"Bagi anak-anak muda, peminat bidang IT, bisa belajar banyak, ketika Apple hadir di sini," ujar dia.

"Menurut saya bagus ya. Apple ini kan perusahaan dengan brand yang sudah memiliki standar hi-tech yang tinggi dan teknologi yang canggih. Bagi para pengguna HP dan gadget, laptop Apple ini menempati ranking paling atas.

Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

Anggota Komisi VII DPR RI



Komisi VII FPKS: Industri Halal, Peluang Besar Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta (03/12) --- Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Indonesia dalam sektor industri halal global sebagaimana dilaporkan dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023/2024.

Dengan konsumsi produk halal global yang diproyeksikan mencapai US\$ 2,4 triliun atau sekitar Rp 37.200 triliun pada tahun 2024, Alqassam menilai bahwa potensi ini harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri halal, khususnya di sektor makanan dan minuman serta modest fashion, menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin pasar global. Pertumbuhan signifikan sebesar 5,87% untuk makanan dan minuman halal serta 3,81% untuk modest fashion halal membuktikan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional," ujar Al-Qassam.

Al-Qassam memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam memperluas promosi produk halal Indonesia melalui ajang internasional, seperti partisipasi di Halal Expo Turki.

Pada tahun 2023, Indonesia berhasil mencatatkan komitmen transaksi perdagangan

sebesar Rp 10,4 miliar. Tahun ini, Paviliun Indonesia kembali hadir untuk memperkenalkan keunggulan produk-produk halal Tanah Air kepada dunia.

"Kehadiran Indonesia di pameran halal internasional tidak hanya memperluas jaringan pasar, tetapi juga mempertegas posisi kita sebagai salah satu pemain utama dalam industri halal global. Ini adalah wujud nyata dari semangat bangsa untuk mengambil peran strategis di kancah internasional," tambahnya.

Sebagai Anggota DPR RI Komisi VII yang membidangi perindustrian, Al-Qassam berko-

mitmen untuk mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya inovasi produk, peningkatan kualitas, serta digitalisasi pemasaran untuk memperkuat daya saing produk halal Indonesia.

"Melalui dukungan regulasi yang tepat dan penguatan ekosistem industri halal, saya optimis Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah global. Potensi besar ini harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional," tuturnya.

Dalam penutupnya, Al-Qassam mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperkokoh posisi Indonesia di industri halal global.

"Ekonomi syariah adalah masa depan. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia yang tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia," tutupnya.

"Ekonomi syariah adalah masa depan. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia yang tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia,"

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Komisi VII DPR RI



Program Makan Bergizi Gratis

Optimalkan bagi Pesantren dan Madrasah

”

“Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI





Demi Keadilan, HNW Ingatkan Program Makan Bergizi Gratis Juga bagi Pesantren dan Madrasah

Jakarta (05/12) --- Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang diantaranya membidangi urusan agama dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid,

mengapresiasi akan disalurkanna program makan bergizi gratis juga bagi peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.

HNW sapaan akrabnya mendorong Pemerintah agar persiapan makan bergizi gratis dikelola langsung oleh satuan pendidikan keagamaan, khususnya yang memang sudah memiliki dapur mandiri seperti di Pesantren.

"Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis(05/12).

Diketahui, untuk menyalurkan makan bergizi gratis Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ini mendorong agar khususnya Pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri. Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makan-

an, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya Pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh Pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familiar dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," sambungnya.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional, target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di

sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali.

Salahnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk Santri dan siswa Madrasah, sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," pungkaskanya.

"Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



Terkait Mundurnya Gus Miftah, Aleg PKS Harap Pejabat Publik Kedepankan Etika Saat Sampaikan Pendapat

Jakarta (06/12) — Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Hal itu disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang. Miftah mundur karena dinilai merendahkan penjual es teh saat menyampaikan dakwahnya.

Atas hal ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengharapkan peristiwa ini menjadi Pelajaran bagi semua, khususnya para pejabat publik.

“Semoga peristiwa ini, menjadi pembelajaran seluruh masyarakat terutama pejabat publik untuk mengedepankan etika dalam menyampaikan

pendapat,” kata pria yang akrab disapa Fikri, dalam keterangannya, Jumat (06/12) di Jakarta.

Lebih lanjut, Fikri mengungkapkan sebaiknya pejabat negara dan juga sebagai pendakwah menjadi panutan atau contoh di masyarakat.

“Yang bersangkutan, apapun statusnya (saat itu) adalah pejabat negara, nah oleh karenanya nampaknya juga relevan apa tidak sebaiknya ada ketentuan-ketentuan protokoler kode etik pejabat publik, sehingga tidak sampai menyakit hati masyarakat,” ujar legislator Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) ini.

Menurut Fikri, apa yang dilakukan oleh Miftah perundungan verbal yang berpotensi memecah kerukunan.

“Di Komisi VIII ada yang menyampaikan bahwa memang kerukunan itu harus kita usahakan bersama. Kita yang seagama saja, lantaran status ekonomi yang berbeda lantas saling menghina atau melecehkan,” ujar dia.

“Bagaimana hendak merukunkan elemen bangsa dengan agama yang berbeda, bahkan dengan suku yang berbeda? Mestinya kita punya semangat persatuan yang sama, yakni menegakkan ikatan pilar berbangsa dan bernegara kita Bhineka Tunggal Ika, agar rukun bersatu, dalam damai,” imbuh Fikri

Sehingga dengan adanya peristiwa yang viral belakangan ini, kata Fikri, menjadi pembelajaran bagi semua pejabat di tanah air agar menjaga sikap saat bertemu masyarakat.

“Sungguh pun mungkin yang bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mundur, tetapi benar-benar untuk tidak diulangi, dan juga bukan hanya untuk yang bersangkutan tetapi pejabat lain, tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Miftah menuai kecaman publik karena mengolok-olok penjual es teh bernama Sunhaji. Saat diminta



“Sungguh pun mungkin yang bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mundur, tetapi benar-benar untuk tidak diulangi, dan juga bukan hanya untuk yang bersangkutan tetapi pejabat lain, tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif,”

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Komisi VIII DPR RI

memorong dagangan penjual itu, Miftah malah melontarkan ucapan 'goblok' kepada Sunhaji.

Miftah—yang ditegur Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya—sudah meminta

maaf ke publik melalui video dan meminta maaf langsung Sunhaji. Selain Miftah yang sudah mendatangi Sunhaji, penjual es teh itu juga sudah datang ke tempat tinggal Miftah.



image istimewa

Anggota FPKS Ungkap Prioritas Saat Ini Ciptakan Lapangan Kerja untuk Milenial dan Gen Z

Jakarta (03/12) — Publik menurut Survei Litbang Kompas menginginkan pengurangan pengangguran menjadi salah satu prioritas program kerja Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja pertama.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengungkapkan jika harapan publik terhadap pengurangan pengangguran bisa menjadi masukan yang berharga terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Terlebih saat ini berdasar

"Kita mendukung rencana Presiden Prabowo yang akan membuka 19,9 juta lapangan pekerjaan. Terutama menaruh perhatian kepada generasi muda."

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, ada 3,6 juta Gen Z usia 15-24 yang menganggur. Jika ditambah dengan mereka yang tergelong bukan angkatan kerja tetapi tidak sedang sekolah atau pelatihan, jumlah pengangguran mencapai 9,9 juta.

"Kita mendukung rencana Presiden Prabowo yang akan membuka 19,9 juta lapangan pekerjaan. Terutama menaruh perhatian kepada generasi muda termasuk Generasi Milenial dan Gen Z karena mereka di usia produktif," ungkap Kurniasih.

Kurniasih menyebut, dirinya selalu menekankan program peningkatan keterampilan melalui skilling, up-skilling dan re-skilling. Selain itu, target penciptaan lapangan kerja ini juga tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga.

Ia berharap program hilirisasi industri yang akan dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, memberikan kesempatan pembukaan lapangan kerja bagi

anak muda Indonesia.

Selain itu, dia meminta perhatian lebih pada penciptaan ekosistem industri kreatif. Industri kreatif yang bergerak baik bisa menjadi penopang bagi industri lainnya.

Kurniasih juga menyoroti tingginya pengangguran yang berasal dari lulusan SMK, padahal lulusan SMK ini yang diharapkan bisa langsung masuk kerja.

"Harus dibuka lapangan kerja yang luas bagi para lulusan SMK terutama pada industri yang cenderung padat karya seperti industri manufaktur. Oleh karena itu kemudahan investasi pada industri ini perlu direalisasikan sebagaimana yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja," papar dia.

Selain itu juga pasar kerja luar negeri bagi lulusan SMK ini bisa menjadi alternatif. Untuk itu perlu dibuka dan diperluas kerjasama untuk penempatan pekerja migran bagi lulusan SMK melalui mekanisme G to G maupun G to B di luar negeri.



image istimewa

Politisi PKS: Kenaikan UMP 6,5% Bukti Keberpihakan Pemerintah terhadap Pekerja

Jakarta (07/12) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, memberikan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025.

Keputusan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Menurut Alifudin, langkah ini adalah wujud nyata pemerintah dalam memperhatikan nasib para pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang kian kompleks.

"Sebagai wakil rakyat, saya sangat mendukung kebijakan ini. Kenaikan UMP sebesar 6,5% adalah langkah positif yang akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia" ungkap Alifudin.

Menurutnya, keputusan ini penting karena akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Alifudin menilai bahwa kenaikan UMP ini adalah respon yang bijak terhadap inflasi yang terus meningkat dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja menjadi salah satu

faktor kunci dalam mencapai kestabilan ekonomi jangka panjang.

"Pekerja yang sejahtera akan lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih maksimal pada perekonomian negara. Kenaikan ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan hak-hak pekerja," tambahnya.

Sebagai anggota DPR yang memiliki fokus pada isu ketenagakerjaan, Alifudin juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menciptakan formula penghitungan UMP yang lebih fair dan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kami menyadari bahwa di satu sisi, kenaikan upah juga harus diimbangi dengan kondisi perekonomian yang stabil. Oleh karena itu, kenaikan 6,5% ini adalah pilihan yang sangat tepat dan sudah melalui pertimbangan yang matang," kata Alifudin.

Meskipun mendukung kebijakan ini, Alifudin juga mengingatkan perlunya perhatian

BERIKUTNYA >>>

Politisi PKS: Kenaikan UMP 6,5% Bukti Keberpihakan Pemerintah terhadap Pekerja

« SEBELUMNYA

lebih terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mungkin terdampak oleh kenaikan upah.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan berbagai stimulus atau dukungan agar UMKM tetap dapat bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, meski dalam situasi yang menantang.

Alifudin juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan ini dengan pengawasan yang ketat.

"Saya berharap seluruh pemerintah daerah dan perusahaan dapat menjalankan kebijakan ini secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menghindari kewajiban ini dengan

berbagai alasan," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan ketegangan sosial.

Lebih lanjut, Alifudin menyatakan bahwa kebijakan kenaikan UMP ini tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga dengan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

"Pekerja yang sejahtera dan terampil akan membuat Indonesia lebih kompetitif. Jika sektor industri dapat menjaga kualitas dan daya saingnya, maka Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di Asia," ungkapnya.

Alifudin berharap, ke depannya, kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan dapat semakin memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pengusaha dan hak-hak pekerja.

"Dukungan terhadap kenaikan UMP ini adalah bagian dari usaha mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata, serta sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," tutupnya.



"Saya berharap seluruh pemerintah daerah dan perusahaan dapat menjalankan kebijakan ini secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menghindari kewajiban ini dengan berbagai alasan,"

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Harap OJK dan Bank Himbara Tingkatkan Dukungan pada UMKM Sektor Pangan

Lampung (10/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly meminta agar OJK dan Perbankan yang tergabung dalam Himbara untuk meningkatkan dukungan kepada UMKM sektor pangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Junaidi yang disapa Bang Jun dalam kunjungan dan diskusi terbatas bersama OJK dan Perbankan Himbara di Bandar Lampung, Senin dan Selasa, (9 & 10 Des 2024).

“Harapan terhadap peningkatan dukungan tersebut tidak lah sulit dilakukan, mengingat kinerja perbankan di Provinsi

“Harapan terhadap peningkatan dukungan tersebut tidaklah sulit dilakukan, mengingat kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif selama periode 2024, dilihat dari peningkatan asset perbankan, penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan maupun menurunnya kredit bermasalah (NPL)”

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung menunjukkan pertumbuhan positif selama periode 2024, dilihat dari peningkatan asset perbankan, penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan maupun menurunnya kredit bermasalah (NPL)”, tegas Junaidi selaku Anggota Komisi XI DPR RI.

Dukungan yang diharapkan, imbuh Junaidi terutamanya diarahkan pada kemudahan akses dan dukungan pembiayaan sektor UMKM yang bergerak pada bidang usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

“Hal ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat pertumbuhan ekonomi ketiga sektor ini sempat mengalami kontraksi sebesar 1,14% (yoy) pada posisi triwulan III-2024. Padahal senyatanya, ketiga sektor tersebut memberikan

kontribusi besar terhadap perekonomian Lampung yaitu sebesar 27,34%”, terang Junaidi Anggota DPR RI dari Dapil Lampung ini

Belum lagi ditinjau dari letak strategis dan demografi, dimana provinsi Lampung di nilai banyak kalangan terutama Pemerintah Pusat adalah daerah yang sangat berpotensi menjadi Sentra Pangan Nasional untuk wilayah Sumatera.

“Maka, tidak ayal, kondisi demikian akan menjadi keuntungan bagi Provinsi Lampung untuk berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan pada pelaksanaan kebijakan dan program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan oleh Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo”, ungkap Junaidi.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif

Memperingati

Hari Anti Korupsi Sedunia

9 Desember 2024

*Teguhkan Komitmen
Berantas Korupsi untuk
Indonesia Maju*

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

Ketua Fraksi PKS DPR RI





image istimewa

Aleg PKS Dukung Langkah Pemerintah Sertakan Pengemudi Ojol sebagai Penerima Subsidi BBM

Jakarta (06/12) --- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani mendukung langkah Pemerintah untuk menyertakan pengemudi ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Meitri menilai kebijakan ini dapat membantu meringankan beban daya beli masyarakat kelas menengah-bawah, yang terancam semakin tertekan oleh sejumlah kebijakan ekonomi yang akan diberlakukan pada 2025.

Menurut politikus muda PKS ini, setidaknya ada tiga kebijakan pemerintah di tahun mendatang yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, kenaikan iuran wajib BPJS Kesehatan, serta pembatasan BBM bersubsidi.

"Kebutuhan BBM mencakup sekitar 60 persen dari biaya operasional pengemudi ojol. Dengan adanya pembatasan subsidi BBM yang berpotensi menaikkan harga bahan bakar, pendapatan pengemudi ojol bisa terdampak, dan ini bisa menyebabkan kenaikan tarif layanan bagi konsumen. Oleh karena itu, skema subsidi BBM bagi pengemudi ojol ini sangat diharapkan untuk menjaga tarif tetap terjangkau dan kelang-

surhan hidup para pelaku usaha mikro dalam ekosistem ekonomi digital," jelas Meitri di Jakarta, Kamis (05/12).

Anggota DPR RI Dapil Jatim VIII ini mengungkapkan, sektor transportasi online memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, transaksi dari transportasi online di Indonesia telah menembus Rp 142,7 triliun pada 2024. Selain itu, industri ini turut menyerap banyak tenaga kerja, terutama di tengah fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat.

Meitri menambahkan, layanan ojol juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pedagang makanan dan barang yang mengandalkan platform online untuk menjual produk mereka.

"Layanan ojol telah menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian masyarakat. Ditambah, lebih dari 4 juta

BERIKUTNYA >>>

Aleg PKS Dukung Langkah Pemerintah Sertakan Pengemudi Ojol sebagai Penerima Subsidi BBM

« SEBELUMNYA

orang, baik pria maupun wanita, menggantungkan hidup pada profesi ini. Oleh karena itu, kami melihat pemberian subsidi BBM kepada pengemudi ojol sebagai bentuk dukungan atau apresiasi nyata dari pemerintah terhadap mereka yang turut berperan besar dalam perekonomian nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Meitri meng-

ingatkan bahwa penyaluran subsidi BBM kepada pengemudi ojol harus dilakukan dengan mekanisme yang memadai agar tepat sasaran.

Pemerintah lewat Pertamina, secara teknis, perlu memastikan adanya pemeriksaan yang memadai di SPBU untuk mengecek kelengkapan atribut dan/atau otentisitas akun pengemudi ojol sebelum mereka mengisi bahan bakar.



“Petugas SPBU perlu memverifikasi akun pengemudi ojol sebelum melayani pengisian bahan bakar. Selain itu, kami juga menyarankan agar Pertamina menyediakan jalur khusus di SPBU bagi pengemudi ojol untuk memisahkan layanan BBM subsidi dan non-subsidi,” tambahnya.

Anggota DPR asal Mojokerto ini berharap pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada kelompok masyarakat yang rentan terdampak kebijakan ekonomi baru, terutama mereka yang berada di kelas menengah-bawah.

“Subsidi BBM bagi pengemudi ojol seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya mendukung operasional mereka, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok kelas menengah, yang berdasarkan survei BPS 2024, menyumbang sekitar 81,49% dari total konsumsi nasional. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam perekonomian Indonesia,” kata Meitri.

Dengan kebijakan subsidi BBM ini, sambung Meitri, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengemudi ojol, pelaku UMKM, serta daya beli masyarakat kelas menengah, sehingga turut mendukung ketahanan ekonomi mereka, pungkasnya.



“Kebutuhan BBM mencakup sekitar 60 persen dari biaya operasional pengemudi ojol. Dengan adanya pembatasan subsidi BBM yang berpotensi menaikkan harga bahan bakar, pendapatan pengemudi ojol bisa terdampak, dan ini bisa menyebabkan kenaikan tarif layanan bagi konsumen. Oleh karena itu, skema subsidi BBM bagi pengemudi ojol ini sangat diharapkan untuk menjaga tarif tetap terjangkau dan kelangsungan hidup para pelaku usaha mikro dalam ekosistem ekonomi digital,”

Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.

Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Sampaikan Apresiasi dan Pertanyaan Soal Kesejahteraan Pensiunan PLN

Jakarta (03/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PLN yang membahas berbagai isu strategis terkait pelayanan dan kinerja perusahaan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Haji Jalal ini memberikan apresiasi kepada PLN atas kinerjanya yang semakin baik, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan listrik dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun, selain memberikan apresiasi, Haji Jalal juga menyampaikan sebuah pertanyaan penting kepada Direktur PLN yang hadir dalam rapat tersebut.

Ia menyoroti kondisi para pensiunan PLN yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat, khususnya di Purwakarta.

Haji Jalal mengungkapkan

adanya laporan mengenai pensiunan yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak.

"Saya meminta pihak PLN untuk melakukan pengecekan terkait kondisi ini. Mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti, agar para pensiunan yang telah mengabdikan kepada perusahaan mendapatkan hak mereka dengan layak, termasuk kesejahteraan pasca-pensiun," ujar Haji Jalal dalam rapat tersebut.

RDP ini diharapkan menjadi langkah awal untuk terus memperbaiki layanan sekaligus memastikan kesejahteraan para mantan karyawan PLN yang telah berjasa dalam membangun perusahaan.

"Saya meminta pihak PLN untuk melakukan pengecekan terkait kondisi ini. Mohon diperhatikan dan ditindaklanjuti, agar para pensiunan yang telah mengabdikan kepada perusahaan mendapatkan hak mereka dengan layak, termasuk kesejahteraan pasca-pensiun,"

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Komisi XII DPR RI

Politisi PKS Dorong Percepat Elektrifikasi dan Transisi Energi untuk Kepentingan Rakyat

Jakarta (06/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyoroti berbagai isu strategis terkait langkah PLN dalam mewujudkan keadilan energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

Salah satu perhatian utama politisi PKS ini adalah keterlambatan penyelesaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033, yang merupakan pedoman utama bagi PLN untuk menjalankan program strategis nasional.

Ia mendesak PLN agar segera merampungkan dokumen tersebut guna memastikan keberlanjutan rencana kerja yang mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

“RUPTL adalah fondasi penting bagi PLN dalam menyusun program-program strategis. Penyelesaian dokumen ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan agar seluruh target dan rencana dapat terealisasi dengan baik,” ujar

Legislator asal Sumbar II ini.

Selain itu, Nevi menyoroti usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang diajukan oleh PLN. Ia meminta kejelasan mengenai target rasio elektrifikasi hingga 2025, terutama mengingat masih ada sekitar 0,22% penduduk yang belum mendapatkan akses listrik, mayoritas berada di wilayah terpencil.

PLN diharapkan mampu mempercepat realisasi program listrik desa untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100% sesuai target pemerintah.

Lebih lanjut, Anggota DPR Komisi XII ini juga memberikan apresiasi atas peningkatan kinerja keuangan PLN, yang mencatat kenaikan laba bersih sebesar 57% pada 2023 diban-

dingkan tahun sebelumnya.

Namun, Nevi mengingatkan agar PLN terus menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pengelolaan liabilitas yang saat ini masih cukup besar. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan konsolidasi agar kinerja PLN tetap solid di masa depan.

Dalam upaya transisi energi, Hj. Nevi menekankan bahwa PLN harus menunjukkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil dan meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT).

Komitmen terhadap target dekarbonisasi dan transisi menuju Net Zero Emission menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

“PLN memiliki peran besar dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan akses listrik, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar kita dapat memberikan dampak



“PLN memiliki peran besar dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan akses listrik, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar kita dapat memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.”

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi XII DPR RI

positif bagi generasi mendatang,” tegas Nevi Zuairina.

Dengan dukungan pemerintah dan DPR, PLN diharapkan terus memperkuat transformasi internal dan eksternal dalam menciptakan sistem ke-

listrikan yang lebih adil, andal, dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai swasembada energi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.



Muh Haris: Subsidi BBM untuk Rakyat Wujud Amanah Konstitusi

Jakarta (05/12) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang masih mengizinkan driver ojek online (ojol) membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite.

Muh Haris menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM harus sepenuhnya diarahkan untuk rakyat kecil, termasuk para pengemudi ojol, sesuai dengan amanah konstitusi.

“UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan subsidi BBM harus memastikan itu, terutama bagi kelompok masyarakat kecil seperti driver ojol,” ujar Muh Haris di Jakarta, Kamis (05/12).

Haris juga menekankan pentingnya keberlanjutan

subsidi sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Menurutnya, para pengemudi ojol merupakan salah satu elemen penting dalam roda perekonomian, yang berhak mendapatkan akses subsidi BBM untuk menunjang mata pencaharian mereka.

“Kami di DPR akan terus mendorong agar subsidi BBM benar-benar sampai ke tangan rakyat kecil, termasuk para pengemudi ojol yang menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi dan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, Haris

mengimbau masyarakat untuk menghormati proses yang tengah dilakukan pemerintah dalam menyusun aturan subsidi BBM, khususnya terkait ojek online. Ia meminta semua pihak bersabar dan tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum kebijakan final diumumkan.

“Pemerintah perlu waktu untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran. Saya percaya, dengan kajian yang matang dan pendekatan yang inklusif, aturan ini akan memberikan keadilan bagi semua pihak,” katanya.

Muh Haris juga mendorong pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi driver ojol, dalam perumusan kebijakan tersebut. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

“Subsidi BBM adalah hak rakyat kecil, dan harus dikelola dengan prinsip keadilan. Kami akan terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Haris.

Sebagai wakil rakyat, Muh Haris menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi BBM tidak hanya sesuai dengan amanah konstitusi, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kecil, termasuk para pengemudi ojek online.



“Subsidi BBM adalah hak rakyat kecil, dan harus dikelola dengan prinsip keadilan. Kami akan terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan,

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Komisi XII DPR RI



Pertambangan Ilegal Libatkan WNA
Rugikan Negara Triliunan Rupiah

**PKS : Minta Pemerintah Lakukan
Pencegahan dan Penegakan
Hukum yang Tegas!!**



PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pkspidanti | @pkspidanti | @pkspidanti #1



Di Indonesia ada **2.741 lokasi** yang menjadi tempat tambang ilegal tanpa izin (PETI).

480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP)

133 lokasi berada di dalam IUP

2.128 lokasi lainnya masih harus diidentifikasi lebih lanjut

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pkspidanti | @pkspidanti | @pkspidanti #2



Penambangan ilegal di beberapa wilayah melibatkan Warga Negara Asing (WNA)

1 Penambangan bijih emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat melibatkan WNA China

Nilai kerugian: **Rp1,02 triliun**

Angka berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kilogram dan perak 937,7 kilogram.

Hukuman: **3 tahun 6 bulan**

dan wajib membayar denda Rp 30 miliar atau subsider 6 bulan kurungan bila tidak membayar



PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pkspidanti | @pkspidanti | @pkspidanti #3



2 Penambangan emas ilegal di wilayah Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Ada 25 lokasi tambang di kawasan hutan, dengan 48 hektar hutan lindung yang digunakan secara ilegal.

Nilai kerugian: **Rp1,08 triliun**

Sebanyak 15 TKA asal China diduga terlibat dalam pengelolaan tambang ilegal itu.



PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pkspidanti | @pkspidanti | @pkspidanti #4



“*Tambang ilegal telah menjadi masalah serius yang merusak lingkungan, merugikan negara dari sisi pendapatan, dan memicu konflik sosial di masyarakat.*

Lebih parahnya, sering ditemukan adanya oknum yang membekingi aktivitas ini, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit.



**Dr. H. Muh. Haris,
S.S., M.Si.**

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pkspidanti | @pkspidanti | @pkspidanti #5

Info Grafis

Fraksi PKS DPR RI



Aleg PKS Dukung Pemindahan Napi Narkoba ke Nusakambangan Disertai Penataan dan Pembinaan Lapas

Jakarta (02/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia mendukung langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyrakatan, Agus Andrianto, yang memindahkan ratusan narapidana narkoba ke Nusakambangan.

Menurut Meity, pemindahan tersebut bermula dari persoalan kasus viral pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan dan pandangan umum di masyarakat mengenai napi narkoba.

"Masuk, masih tingkat SD. Keluar, sudah sarjana. Itu guyonan masyarakat soal narapidana terkait Narkoba. Jadi saat ditangkap hanya pemakai. Setelah masuk Lembaga pemasyarakatan (Lapas), dan bebas, justru berubah jadi pengedar, bahkan jadi bandar. Itu bentuk kritik sebenarnya," pungkas Anggota Komisi XIII ini.

Kalimat satir itu, disampaikan Meity kepada awak media, saat ditanya tentang upaya pemindahan narapidana kasus Narkoba ke penjara pulau Nusakambangan dari sejumlah Lapas di Indonesia.

Menurut Meity, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan pencegahan agar kejadian seperti Rutan Salemba beberapa waktu lalu, tidak terulang.

"Kita dukung sebagai bentuk pencegahan dan keseriusan pemerintah dalam memberan-

tas Narkoba di tanah air yang kita cintai ini," ungkapnya.

Namun, Meity menambahkan bahwa tak kalah penting dari peristiwa Rumah Tahanan Kelas Satu Salemba adalah transparansi Lapas soal sistem dan peningkatan kualitas pembinaan yang mereka lakukan terhadap narapidana.

"Hal itu sangat penting untuk menjawab guyon dari masyarakat tadi. Masuk Lapas skill level SD, keluar sarjana," tandas Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan II ini.

"Apa yang terjadi di Rutan Salemba, dan barangkali di beberapa Lapas dengan kejadian serupa, cukup

mengundang banyak tanya. Sebanyak 7 orang napi Narkoba yang tinggal dalam satu sel, bisa melarikan diri secara bersamaan tanpa diketahui oleh petugas. Kemudian, bangunan Rutan itu juga dilengkapi CCTV, tapi tak ada jejaknya," jelasnya.

Menyusul peristiwa Rutan Salemba, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan meminta sejumlah Lapas memindahkan Napi Narkoba ke Nusakambangan. Upaya ini juga untuk mengurangi over kapasitas di Lapas.

Terbaru, langkah ini dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan dari pihak terkait, kebijakan ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib). Sejumlah 14 warga binaan Lapas Kelas I Semarang berhasil dipindahkan pada Sabtu dini hari pukul 03.30-05.30 WIB (30/11).

"Kita dukung sebagai bentuk pencegahan dan keseriusan pemerintah dalam memberantas Narkoba di tanah air yang kita cintai ini,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atroaktif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

Baleg DPR RI dari FPKS Dorong Pusat Data Nasional melalui Revisi UU Statistik

Jakarta (03/12) -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, menegaskan pentingnya penguatan sistem data nasional melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Hal ini disampaikan Reni dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Baleg DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (3/12/2024).

FGD tersebut merupakan bagian dari persiapan pembahasan revisi UU Statistik yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025.

Reni menyoroti urgensi pembaruan UU Statistik yang telah berusia 27 tahun agar sesuai dengan kebutuhan zaman.

"Regulasi ini sudah sangat lama, sehingga perlu dilakukan update untuk menjawab per-

kembangan teknologi dan dunia statistik modern seperti big data, artificial intelligence, dan machine learning," ujar Reni.

Ia juga meminta BPS untuk Menyusun dan memberikan resume pasal-pasal yang akan dihapus, diganti, ditambahkan, atau direvisi. Agar pembahasan yang dilakukan bersama Badan Legislasi DPR RI akan berjalan lebih komprehensif.

"Dengan persiapan matang, revisi ini diharapkan menghasilkan regulasi baru yang komprehensif dan relevan dengan tantangan masa kini,"

tambahnya.

Reni menekankan pentingnya BPS sebagai institusi utama yang menyinergikan seluruh data nasional melalui program Satu Data Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

"BPS harus menjadi leading sector dalam sinergisasi, harmonisasi dan pemanfaatan data yang terintegrasi di portal Satu Data Indonesia," kata legislator perempuan asal Surabaya itu.

Lebih lanjut Reni berpandangan bahwa posisi Badan Pusat Statistik kedepan harus memiliki otoritas yang lebih besar dari sebelumnya. Sehingga upaya dalam penyelenggaraan kebutuhan data nasional dapat berjalan lebih maksimal.

"Kelembagaan BPS seperti ini harus dibuat setara dengan kementerian yang mempunyai otoritas lebih tinggi. Sehingga BPS tidak hanya sebagai penyelenggara dalam menghimpun data-data, namun juga sebagai Koordinator dalam pengambilan data dan pengambilan kebijakan untuk memusatkan satu data," ujar Politisi PKS tersebut.

Ia meyakini, penguatan terhadap peran BPS dalam regulasi baru akan meningkatkan kualitas data nasional dan mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

Dengan pembaruan regulasi yang diusulkan, Reni berha-



"Data yang kuat dan terpercaya adalah kunci bagi perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga revisi UU ini akan sangat penting untuk masa depan statistik dan pusat data di Indonesia,"

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

rap sistem data di Indonesia menjadi lebih terpadu dan akurat.

"Data yang kuat dan terpercaya adalah kunci bagi perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga revisi UU ini akan sangat penting untuk masa depan statistik dan pusat data di Indonesia," pungkas Reni.

Revisi UU Statistik yang merupakan salah satu usulan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025 harus senantiasanya dikawal supaya berjalan sesuai harapan. Semua pihak harus secara aktif memberikan saran dan masukan dalam pembahasan revisi UU tersebut.



image istimewa

Sohibul Iman Minta Dunia Antisipatif Hadapi Kembali Pandemi Global

Jakarta (04/12) — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Sohibul Iman menilai bahwa dunia perlu bersikap antisipatif dalam mempersiapkan diri menghadapi pandemi yang mengancam kesehatan global.

Hal itu disampaikan Sohibul saat menghadiri acara Regional Conference for Parliaments of the Asia-Pacific Region on Global Health Security yang diselenggarakan pada 2-3 Desember 2024 di Bangkok, Thailand.

Dalam kesempatan itu, ia pun mengungkapkan bahwa

Indonesia menyampaikan masukan dan pengalamannya dalam konferensi terkait dengan masalah kesehatan global.

"Ya tentu Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman yang sama dengan negara lain menghadapi COVID-19, tadi kita sampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk juga berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh DPR untuk merespon COVID itu," ujar Sohibul seperti dikutip pada laman DPR RI, Selasa (03/12/2024)

Politisi Fraksi PKS ini pun menjelaskan kegiatan tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan di

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman yang sama dengan negara lain menghadapi COVID-19. tadi kita sampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk juga berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh DPR untuk merespon COVID itu,"

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, M.Eng., Ph.D.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

tiap-tiap negara. Khususnya bagaimana peran para anggota parlemen di dalam meningkatkan kesehatan.

"Khususnya kesiapan di dalam menghadapi pandemi, seperti yang terjadi pada waktu COVID-19," jelas Iman

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa capaian yang diharapkan dari acara ini adalah agar bagaimana legislatif bisa berperan lebih baik lagi dalam menangani COVID-19, yang berpotensi terjadi kembali di masa mendatang, di samping adanya upaya dari pemerintah itu sendiri.

"Walaupun kita tidak mengharapkan," imbuh politisi Fraksi PKS ini.



image istimewa

Ketua BKSAP DPR RI dari FPKS Serukan Parlemen se-Asia Tenggara Libatkan Anak Muda Perangi Korupsi

Jakarta (10/12) --- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Organisasi anti-korupsi antar anggota parlemen se-Asia Tenggara, the South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC), Mardani Ali Sera menyerukan Parlemen se-Asia Tenggara untuk melibatkan anak muda dalam memerangi korupsi.

Hal tersebut disampaikan Mardani menyambut peringatan Hari International Anti Korupsi Dunia, Senin (09/12/2024).

Generasi muda di Asia Tenggara, kata Mardani, secara signifikan menerima dampak buruk dari korupsi.

Tema utama UN International Anti-Corruption Day 2024 yakni *Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity* sangat relevan dengan tantangan pemberantasan korupsi saat ini.

"Kaum muda adalah calon-calon pemimpin yang harus memiliki bekal integritas sejak dini. Di sisi lain, mereka menjadi pihak yang secara signifikan terdampak korupsi," lanjutnya.

Mardani menegaskan sifat kejahatan korupsi sebagai bagian dari musuh kemanusiaan. Korupsi merusak seluruh agenda kesejahteraan, kemajuan, dan kesetaraan. Bagi kaum muda, korupsi menyengsarakan

dan menggerus mereka dari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja, keterlibatan di urusan publik, hingga terbatasnya akses layanan kesehatan dan mendasar lainnya.

"Ini merusak mimpi-mimpi kaum muda," urainya.

ASEAN diperkirakan sepertiga dari total populasi kawasan tersebut adalah generasi muda. Jumlah tersebut akan mencapai puncaknya pada 2038 dengan perkiraan mencapai 220 juta jiwa se-Asia Tenggara.

Dengan populasi sebesar itu, tuntutan kaum muda akan anggaran yang tepat guna, bersih, tepat sasaran dengan kebijakan yang memadai adalah kewajiban.

Mardani menyebut untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, korupsi yang mengakar di lembaga pemerintahan dan

BERIKUTNYA >>>

Ketua BKSAP DPR RI dari FPKS Serukan Parlemen se-Asia Tenggara Libatkan Anak Muda Perangi Korupsi

« SEBELUMNYA

parlemen perlu dibasmi.

Anggota Parlemen di Asia Tenggara perlu untuk memerangi korupsi. Salah satu upaya adalah dengan melibatkan kaum muda untuk terlibat sejak dini dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan integritas.

“Parlemen berperan penting untuk memfasilitasi hal tersebut. Sekaligus, memerangi korupsi dari sisi legislasi, anggaran hingga pengawasan dalam mendorong akuntabilitas penggunaan dana publik,” tandasnya.

Ia mengharapkan agar parlemen se-Asia Tenggara dapat membuka pintu bagi

pelibatan suara dan aspirasi kaum muda agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak positif bagi generasi tersebut.

Peluang pelibatan tersebut juga terbuka lebar mengingat, berdasarkan data ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hampir 22% dari total anggota parlemen di ASEAN (minus Timor Leste), tergolong muda.

“Oleh karenanya di AIPA dan ASEAN, pengarusutamaan kebijakan-kebijakan yang pro generasi muda dan yang mendorong penguatan integritas sejak dini sangat diperlukan,” tegas politisi PKS itu.

SEAPAC adalah organisasi antaranggota parlemen di Asia Tenggara yang fokus pada isu anti-korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih dari 100 anggota parlemen dan mantan anggota parlemen dari delapan negara di Asia Tenggara (termasuk Timor Leste) bergabung ke organisasi tersebut.

SEAPAC saat ini memiliki cabang nasional di Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. SEAPAC adalah organisasi regional dari Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC).



Sifat kejahatan korupsi sebagai bagian dari musuh kemanusiaan. Korupsi merusak seluruh agenda kesejahteraan, kemajuan, dan kesetaraan. Bagi kaum muda, korupsi menyengsarakan dan menggerus mereka dari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja, keterlibatan di urusan publik, hingga terbatasnya akses layanan kesehatan dan mendasar lainnya. Ini merusak mimpi-mimpi kaum muda,”

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Ketua Badan Koordinasi Antar Parlemen DPR RI



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Rofik Hananto Salurkan Paket Pompa Air Berbahan Bakar Gas untuk Petani di Banjarnegara

Banjarnegara (11/12) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyalurkan bantuan berupa paket mesin pompa air berbahan bakar gas bagi 300 petani sasaran di Kabupaten Banjarnegara.

Distribusi dilakukan di UPT Balai Benih Padi Palawija Purwonegoro, Banjarnegara, pada Selasa (10/12) dan dihadiri perwakilan Dirjen minyak dan gas bumi kementerian ESDM RI, Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Anggota DPRD F-PKS, Sales area manager retail Tegal PT Pertamina Patra niaga Mahfud Nadyo Hantoro, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra niaga wilayah Banjarnegara dan Pekalongan dan Bagian perekonomian Setda Banjarnegara.

Rofik dalam sambutannya mengatakan bahwa program ini digagas oleh pemerintah karena salah satu isu strategis nasional di Indonesia adalah menjalankan politik energi yang bersih dan ramah lingkungan.

"Program ini dibuat atas usulan DPR RI karena melihat bahwa isu strategis nasional di Indonesia adalah menjalankan politik energi yang bersih dan ramah lingkungan. BBG adalah salah satu alternatif energi hijau ramah lingkungan yang jauh lebih baik daripada energi fosil seperti BBM lainnya," ujar Rofik.

Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Herrina Indi mengatakan bahwa bantuan sebanyak 300 mesin pompa air ini bisa menambah produktivitas petani di Kabupaten Banjarnegara.

"Tahun ini Alhamdulillah mendapatkan bantuan pompa air sebanyak 300 buah, kalau per pompa bisa mengakomodasi 10 hektar, seharusnya bisa meningkatkan produktivitas nya sebanyak 30

hektar di tahun ini, terutama tanaman padi," ujar Herrina. Perwakilan Dirjen Minyak Gas dan Bumi Kementerian ESDM, Azhari, mengatakan bahwa program ini adalah hasil kebijakan pemerintah tentang ketahanan energi.

"Program konversi BBM ke BBG adalah program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan energi yaitu diversifikasi energi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi adalah kami memberikan pilihan kepada Bapak-Ibu petani untuk memakai bahan bakar alternatif selain bensin," ujar Azhari.

Rofik mengharapkan bahwa program ini bisa berkelanjutan agar produktivitas dan kesejahteraan petani bisa meningkatkan di Kabupaten Banjarnegara.

Di Kabupaten Banjarnegara, bantuan ini sudah berjalan selama 3 tahun, dengan total 1.047 Paket Pompa Air (Konkit) yang terdistribusi dengan rincian tahun 2022: 347 paket, tahun 2023: 400 paket, 2024: 300 paket.



"Program ini dibuat atas usulan DPR RI karena melihat bahwa isu strategis nasional di Indonesia adalah menjalankan politik energi yang bersih dan ramah lingkungan. BBG adalah salah satu alternatif energi hijau ramah lingkungan yang jauh lebih baik daripada energi fosil seperti BBM lainnya,"

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII





image istimewa

Masa Reses, HNW Dengarkan Aspirasi Konstituen Hingga Salurkan Bantuan UMKM

Jakarta (10/12) — Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri Hidayat Nur Wahid mulai menyelenggarakan reses perdana keanggotaan DPR-RI 2024-2029 dengan variasi program di tiap titiknya.

Dimulai dengan kegiatan umum seperti pertemuan serap aspirasi konstituen dan warga, mengunjungi dan dialog dengan tokoh masyarakat, hingga yang spesifik menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan realisasi penyaluran bantuan UMKM dan keperluan klub sepak bola.

"UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 di Pasal 81 jelas mengatur bahwa di antara kewajiban Anggota DPR-RI adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kunjungan berkala. Alhamdulillah di reses perdana ini beberapa aspirasi yang telah diterima periode sebelumnya seperti bantuan usaha dan bantuan klub bola bisa disalurkan ke masyarakat, sebagai pertanggungjawaban kinerja Anggota DPR-RI," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/12).

HNW sapaan akrabnya menyebut, sebelumnya para pedagang di kawasan

kebudayaan Betawi Setu Babakan menyampaikan aspirasi kekurangan modal untuk merespons kunjungan wisata dan iklim penjualan yang belum sepenuhnya membaik pasca pandemi covid-19.

Dirinya menindaklanjuti dengan mengkomunikasikan ke Kementerian Sosial yang merupakan mitra komisi VIII DPR-RI dan mendapatkan dukungan sehingga dapat menyalurkan modal usaha kepada 25 UMKM yang tergabung ke dalam kelompok Persaudaraan Pedagang Setu Babakan Timur, dengan total bantuan sebesar Rp 50 juta. Warga menyampaikan terima kasih dan berharap agar bantuan serupa juga diberikan kepada pedagang-pedagang lainnya di Setu Babakan.

Selain itu juga ada aspirasi dari klub sepak bola FC Gabungan Olahraga Kalibata Poncol (Gorkap) yang berhasil ditindaklanjuti berupa penyewaan lapangan sepak

Masa Reses, HNW Dengarkan Aspirasi Konstituen Hingga Salurkan Bantuan UMKM

« SEBELUMNYA

bola untuk pertandingan bulanan dan perlengkapan berupa jersey dan bola. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas terakabulkannya permintaan tersebut.

Melihat antusiasme warga untuk main sepakbola, FC Gorkap menyampaikan aspirasi lanjutan agar izin main bola di lapangan tersebut tidak hanya 1 kali dalam sebulan, melainkan sekurang-kurangnya 2 kali

dalam sebulan. HNW menanggapi untuk memperjuangkan lagi.

“Di luar serap aspirasi, tindak lanjut aspirasi dan penyaluran bantuan, saya juga menyelenggarakan reses dengan sarapan pagi dan dialog terbuka bersama tokoh masyarakat di Mampang, bazaar sembako murah di Johar Baru, serta temu kader dan pengurus PKS di Kalibata Jakarta Selatan dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya juga

menyampaikan apresiasi atas kepercayaan mereka kembali memilih saya sebagai wakil mereka/rakyat di DPR,” sambung HNW.

Adapun Reses I DPR-RI 2024-2025 masih akan berlangsung hingga 20 Januari 2025 dan dirinya sudah merancang sejumlah program temu beragam konstituen hingga akhir masa reses tersebut.

Dalam pelaksanaannya, HNW turut bekerja sama dengan mitra kerja Komisi VIII DPR-RI seperti Kementerian Sosial dan BPKH, serta pengurus struktur PKS mulai tingkat ranting, cabang, hingga daerah di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

“Semoga momen reses perdana ini bisa menguatkan kembali ikatan antara rakyat dengan wakilnya yang telah dipilih pada pemilu legislatif 2024 lalu, dalam rangka melaksanakan janji Anggota DPR-RI terpilih yakni memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.



“Di luar serap aspirasi, tindak lanjut aspirasi dan penyaluran bantuan, saya juga menyelenggarakan reses dengan sarapan pagi dan dialog terbuka bersama tokoh masyarakat di Mampang, bazaar sembako murah di Johar Baru, serta temu kader dan pengurus PKS di Kalibata Jakarta Selatan dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan mereka kembali memilih saya sebagai wakil mereka/rakyat di DPR,”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI



Soal Banjir Bandang Sukabumi, Aleg PKS Minta Pemerintah Segera Berikan Bantuan pada Korban

Jakarta (05/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memberikan bantuan secara nyata dan cepat bagi para korban atau warga yang terdampak bencana alam banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Slamet, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

"Saya meminta dan mendesak pemerintah pusat melalui pimpinan, agar khususnya BNPB untuk segera hadir memberikan bantuan yang nyata dan cepat," kata Slamet

Ia mengatakan bantuan itu berupa kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh korban, seperti tenda darurat, makanan, obat-obatan, selimut, dan peralatan masak.

Slamet juga menyampaikan duka mendalam atas rentetan peristiwa bencana, mulai dari banjir hingga longsor, yang terjadi setelah sebagian besar wilayah Sukabumi diguyur hujan deras dengan durasi yang panjang sejak Selasa (3/12) siang sampai dengan Rabu (4/12) pagi.

Dampak bencana itu

menjadi lebih besar akibat luapan empat aliran sungai di Sukabumi yang tidak mampu membendung debit hujan deras.

"Bencana ini telah merusak infrastruktur dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat, terutama mereka yang kehilangan rumah, kebun, dan harta benda lainnya dalam situasi darurat ini," ucap Slamet.

Lebih lanjut Slamet

"Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sukabumi bukan semata-mata cuaca ekstrem, melainkan juga akibat kerusakan ekosistem di daerah hulu. Banyak kawasan hutan yang dulunya subur dan menjadi penyangga lingkungan kini gundul bahkan terlantar. Lahan-lahan HGU, termasuk milik perusahaan dibiarkan tidak terawat,"

menilai bencana seperti itu terjadi bukan hanya karena cuaca ekstrem, melainkan juga akibat kerusakan ekosistem.

"Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sukabumi bukan semata-mata cuaca ekstrem, melainkan juga akibat kerusakan ekosistem di daerah hulu. Banyak kawasan hutan yang dulunya subur dan menjadi penyangga lingkungan kini gundul bahkan terlantar. Lahan-lahan HGU, termasuk milik perusahaan dibiarkan tidak terawat," ucapnya.

Sejalan dengan persoalan itu, Slamet mendesak pemerintah segera mengambil langkah mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, pengendali erosi, dan pemelihara kesuburan tanah.

drh. H. SLAMET
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Barat IV



Perkuat Pemahaman Masyarakat,

Fikri Faqih Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Kota Tegal

Tegal (05/12) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menyosialisasikan empat pilar kebangsaan pada Rabu (4/12/2024) di rumah aspirasi Fikri Faqih, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Dalam proses mengenalkan dan memperkuat pemahaman masyarakat terkait empat pilar kebangsaan tersebut, Fikri mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan kewajiban oleh anggota DPR/MPR untuk menyebarluaskannya.

"Ya sosialisasi empat pilar kebangsaan ini memang menjadi kewajiban kami anggota DPR yang juga otomatis menjadi anggota MPR, jadi ini adalah program MPR untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hal itu," kata Fikri saat berdialog dengan masyarakat.

Ia memberikan, empat pilar kebangsaan yang dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika selaku semboyan negara.

Lebih lanjut dia memberikan, sosialisasi itu penting dilakukan secara intens, karena masih banyak masyarakat yang belum

memahami makna yang terkandung di dalam empat pilar itu.

"Nilah kami memang ditugaskan sebagai anggota DPR yang sekaligus anggota MPR untuk menyosialisasikan empat pilar itu kepada masyarakat," ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah ini.

Menurut Fikri, sangat penting bagi seorang anggota dewan melakukan sosialisasi itu secara intens, sebab pemahaman masyarakat harus sama terhadap semua perkembangan pengetahuan maupun ilmu, termasuk tentang empat pilar kebangsaan.

Dalam kesempatan dialog dengan anggota DPR tersebut, warga juga menyampaikan persoalan dan harapan, diantaranya infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan itu merupakan kewajiban oleh anggota DPR/MPR untuk menyebarluaskannya. Ya sosialisasi empat pilar kebangsaan ini memang menjadi kewajiban kami anggota DPR yang juga otomatis menjadi anggota MPR, jadi ini adalah program MPR untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hal itu,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX



image istimewa

Serahkan Bantuan di Kabupaten Agam,

Nevi Zuairina: Upaya Perkuat Peran Keluarga sebagai Pilar Utama Masyarakat

Kabupaten Agam (04/12) — Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Agam, Anggota DPR RI Asal Sumbar II, Nevi Zuairina, kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat.

Kali ini, Nevi menyerahkan bantuan berupa sound system untuk mendukung kegiatan di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Lundang, Kecamatan Ampek Angkek, dan RKI Bukit Batabuah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas berbagai kegiatan

fasilitas seperti sound system akan menunjang berbagai aktivitas, mulai dari seminar, pelatihan, hingga pengajian, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan harmonis.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

sosial dan pendidikan yang dilaksanakan oleh RKI.

Dalam sambutannya, Politi PKS ini menekankan pentingnya peran RKI sebagai pusat kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan keluarga, pendidikan anak, dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Menurutnya, fasilitas seperti sound system akan menunjang berbagai aktivitas, mulai dari seminar, pelatihan, hingga pengajian, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan harmonis.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus RKI yang telah bekerja keras mewujudkan program-program positif yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Bantuan ini bukan hanya simbol dukungan, tetapi juga bagian dari upaya nyata untuk memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan masyarakat," tutur Nevi.

Anggota Komisi XII ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan fasilitas RKI guna memperbaiki kualitas hidup keluarga dan lingkungan. Ia percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat akan menghasilkan dampak besar bagi pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Di akhir acara, Legislator Perempuan PKS ini berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di RKI Lundang dan Bukit Batabuah. Ia menegaskan pentingnya membangun keluarga yang kokoh sebagai pondasi masyarakat yang sejahtera.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat, yang merasa bahwa kehadiran Nevi membawa energi positif dan perhatian nyata bagi kebutuhan mereka di daerah pemilihannya, Sumatera Barat II.



Qossam Kasuba Suport Langsung Pebulutangkis Maluku Utara di Kejurnas PBSI 2024

Jakarta (03/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Maluku Utara (Malut), Izzuddin Al-Qassam Kasuba menyaksikan langsung Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PBSI 2024 yang digelar pada 3 hingga 8 Desember 2024 .

Qassam Kasuba yang didampingi sang Istri, hadir di Gedung Gelanggang Remaja Pulo Gadung, Rawamangun Jakarta timur, dengan tujuan menyaksikan penampilan Kevin dan Zahra pebulutangkis perwakilan Maluku Utara yang bertanding di Kejurnas bergensi memperebutkan gelar terbaik.

Politisi muda Maluku Utara itu dikesempatan tersebut menuturkan, pebulutangkis yang ada di Maluku Utara saat ini adalah pebulutangkis luar biasa yang masi bisa bersaing dengan peserta daerah lain di Indonesia.

"Alhamdulillah hari ini saya bersama istri tercinta menyaksikan langsung pertandingan bulutangkis perwakilan Maluku Utara yaitu Kevin dan Zahra. Penampilan keduanya luar biasa, itu berarti pebulutangkis kita di Maluku Utara cukup hebat sehingga masi bisa bersaing dengan provinsi lain yang ada di Indonesia," ujar Al-Qassam sapaan akrabnya, selasa (03/12/2024) dini hari.

Dia menyebutkan,

dukungan deras dan support kepada Kevin dan Zahra harus terus di berikan masyarakat Maluku Utara agar keduanya bisa meraih prestasi gemilang di ajang bergensi tersebut.

"Dukungan kepada keduanya harus terus diberikan agar perwakilan kita dapat meraih prestasi luar biasa di ajang ini, sehingga dapat mengharumkan nama baik daerah kita Maluku Utara," harapnya.

Qassam menambahkan, seluruh pihak terkait diharapkan bisa secara bersama-sama terus mendukung peningkatan SDM khususnya cabang olah raga badminton di Maluku Utara.

Komitmen tinggi dan komunikasi kolaborasi untuk peningkatan cabang olah raga bulutangkis harus terus digalakkan semua pihak, agar cabang olahraga badminton di Maluku Utara menjadi lebih berkembang.

"Ini harus digalakkan demi menungjang kiprah dan prestasi putera puteri daerah di laga olahraga nasional khususnya dicabang olahraga Badminton," kata dia mengakhiri.

“Alhamdulillah hari ini saya bersama istri tercinta menyaksikan langsung pertandingan bulutangkis perwakilan Maluku Utara yaitu Kevin dan Zahra. Penampilan keduanya luar biasa, itu berarti pebulutangkis kita di Maluku Utara cukup hebat sehingga masih bisa bersaing dengan provinsi lain yang ada di Indonesia,”

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Komisi VII DPR RI



image istimewa

Bertemu Konstituen, Riyono Berharap Pilkada Serentak Jadi Momentum Perkokoh Persatuan dan Nilai Demokrasi

Magetan (03/12) --- Momentum pilkada serentak, digunakan Anggota Komisi IV DPR RI dari PKS, Riyono melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Tujuannya, memperkuat demokrasi dan menjaga semangat kebangsaan.

Kegiatan sosialisasi 4 pilar ini diadakan di Rumah Aspirasi Riyono Caping, Di desa Jambangan, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Minggu (24/11/2024).

Dalam paparannya, Riyono menyampaikan pentingnya menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

"Pilkada bukan hanya ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga momentum untuk memperkokoh persatuan bangsa dan memperkuat nilai-nilai demokrasi," kata Anggota DPR asli Magetan itu.

Kang Ri, panggilan akrabnya, menjelaskan pentingnya pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai Dasar dan

Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

"Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga. Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan, pada pilkada serentak," imbuhnya.

Sosialisasi diikuti peserta dari kalangan perangkat desa, ketua RT, dan tokoh masyarakat.

Diharapkan peserta sosialisasi mampu meneruskan di lingkungan masing-masing karena dengan cara itu nilai-nilai kebangsaan ini tetap terjaga dan eksis di NKRI.

"Pilkada bukan hanya ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga momentum untuk memperkokoh persatuan bangsa dan memperkuat nilai-nilai demokrasi,"

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VII



image istimewa

Terima Aspirasi PDHI, Slamet: FPKS Berikhtiar agar RUU Pendidikan dan Layanan Kesehatan Hewan Masuk Prolegnas 2025

Jakarta (03/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh. Slamet dan Riyono menerima aspirasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)

soal RUU Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan Indonesia di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Selasa, (03/12).
Ketua Pengurus Besar (PB) Perhimpunan Dokter Hewan

Saat ini masih belum ada cantolan hukum tentang konsil kedokteran hewan. Konsil kedokteran hewan akan dimasukkan dalam UU PKH yang masuk Kumulatif terbuka karena ada revisi dalam omnibus law terbuka,"

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Indonesia (PDHI) Munawarrah memohon Fraksi PKS untuk memfasilitasi dan mendorong RUU Pendidikan dan Layanan Kesehatan Hewan agar bisa masuk Prolegnas Prioritas dan dibahas di tahun 2025 supaya bisa segera disahkan.

"Urgensi RUU ini, dilatarbelakangi upaya mewujudkan ketahanan Pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) guna mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo dalam program susu gratis dan makan bergizi gratis. Melindungi masyarakat Indonesia dari penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia yang diprediksi WHO 75 % berasal dari penyakit hewan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua spesies hewan, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan manusia," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV, Slamet menyampaikan akan mengusahakan RUU Pendidikan dan Layanan

Kesehatan Hewan segera dibahas dan disahkan segera.

"Alhamdulillah sudah komunikasi secara informal terkait masalah ini dengan tim PDHI. Insyaallah RUU ini akan didorong secepatnya masuk dalam pembahasan Kementerian pertanian. Saat ini masih belum ada cantolan hukum tentang konsil kedokteran hewan. Konsil kedokteran hewan akan dimasukkan dalam UU PKH yang masuk Kumulatif terbuka karena ada revisi dalam omnibus law terbuka," jelas Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat IV ini.

Slamet menyampaikan apresiasinya karena telah berkesempatan hadir ke Fraksi PKS serta berharap bisa berkomunikasi dengan Fraksi lain

"Saya mengucapkan terimakasih kepada bapak ibu sekalian atas kesempatannya hadir di Fraksi PKS. insyaAllah akan berkomunikasi dengan Ketua Baleg dan yang aktif di komisi 4," tutup Slamet.



image istimewa

Serikat Pekerja XL Sampaikan Aspirasi Terkait Merger kepada Fraksi PKS DPR RI

Jakarta, 5 Desember 2024 – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, bersama Anggota Komisi IX Achmad Ru'yat dan Anggota Komisi XII Muh Haris,

menerima aspirasi dari serikat pekerja XL yang diwakili oleh Mustakim, Ketua Serikat Pekerja XL. Pertemuan ini membahas kekhawatiran terkait proses merger antara XL Axiata dan

Saya turut merasakan kegelisahan yang disampaikan oleh serikat pekerja dan karyawan XL, sesuai tupoksi akan mencoba memfasilitasi mereka dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Smartfren.

Dalam pertemuan tersebut, Mustakim menyampaikan keresahan serikat pekerja mengenai kurangnya transparansi dari pihak Axiata terkait proses merger ini. Meski hingga kini belum terdeteksi adanya pelanggaran ketenagakerjaan, serikat pekerja merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai, berbeda dengan pengalaman sebelumnya saat merger antara XL dengan Natrindo, di mana komunikasi dengan karyawan berjalan dengan baik.

Serikat pekerja juga mengkhawatirkan potensi perubahan skema kerja dan kemungkinan terjadinya PHK akibat merger ini.

Mereka melihat Industri Telekomunikasi sangat penting bagi ketahanan negara, sehing-

ga dukungan dari anggota dewan sangat diperlukan.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa Fraksi PKS selalu terbuka dalam menerima aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Fraksi PKS mengadakan program Hari Aspirasi yang diadakan dua kali dalam sepekan, agar masyarakat dapat menyampaikan persoalannya secara langsung.

Jazuli menyampaikan turut merasakan kegelisahan yang disampaikan oleh serikat pekerja dan karyawan XL, sesuai tupoksi akan mencoba memfasilitasi mereka dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).



Terima Aspirasi Petani,

F-PKS Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Mendorong Swasembada Pangan Dalam Negeri

Jakarta (03/12) -- Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan aspirasi dan audiensi dari Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) di Ruang Rapat F-PKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa (03/12/2024). Perwakilan aspirator diterima secara langsung oleh Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI dan Tenaga Ahli Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS.

Dalam pertemuan ini, para perwakilan JPPN menyampaikan sejumlah permasalahan pelik yang selalu dialami petani dalam berproduksi. Kondisi ini tentu tak sejalan dengan visi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu menggapai swasembada pangan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

"Beberapa waktu terakhir, kita sering mendengar bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kita akan swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Padahal, fakta di lapangan saat ini, masih sangat banyak hambatan dan tantangan yang dialami petani dan tak kunjung teratasi, khususnya soal praktik impor pangan yang masih terus berlangsung, kepemilikan lahan yang rendah, ketersediaan pupuk yang tak memadai, dan kestabilan harga jual dari setiap hasil produk yang tak menentu",

ungkap salah satu perwakilan aspirator.

"Mayoritas petani kita hari ini hanya mempunyai lahan kurang dari 0,5 hektar. Sebagian dari mereka pun bekerja sebagai buruh tani, pekerja di lahan pertanian, atau penyewa tanah, tidak memiliki tanah. Kami mendorong Pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan lahan dan tanah negara, seperti tanah terlantar dan tanah bekas HGU, untuk digunakan oleh petani dalam rangka mendukung program swasembada pangan", ungkap perwakilan JPPN lain.

Berdasar pada masalah-masalah tersebut, JPPN menyampaikan lima tuntutan para petani yang mereka sebut sebagai "Panca Tura" kepada Fraksi PKS DPR RI agar dapat disampaikan dan diperjuangkan di Komisi IV dan mitra-mitra terkait di pemerintahan,

BERIKUTNYA >>>

Terima Aspirasi Petani, F-PKS Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan dan Mendorong Swasembada Pangan Dalam Negeri

« SEBELUMNYA

khususnya Kementerian Pertanian dan Bulog.

"Pertama, tindak tegas setiap orang yg menghalangi swasembada pangan berkelanjutan dan sehat.

Kedua, tingkatkan kesejahteraan petani dan keluarga, salah satunya dengan menghapus pajak bumi dan bangunan untuk lahan pertanian. Ketiga, berikan

subsidi pupuk organik kepada petani. Keempat, terjaminnya kepastian harga dari setiap produk petani dan wajib diserap oleh Bulog. Kelima, berikan hak kepada para petani untuk mengelola tanah-tanah negara, khususnya tanah yg terlantar", ungkap pimpinan JPPN.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tenaga Ahli Komisi IV Fraksi PKS, Aditya, menyatakan akan menyampaikan harapan, masukan, dan tuntutan petani

tersebut kepada Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS.

"Semua masukan-masukan yang sudah disampaikan tadi, sudah kami catat dengan baik. InshaAllah, kami pastikan akan diteruskan kepada Anggota DPR F-PKS untuk nantinya ditindaklanjuti lebih jauh bersama mitra-mitra kami di Komisi IV", ujar Aditya.

Lebih lanjut, ia pun meminta dukungan dan kolaborasi dari JPPN, khususnya dalam memberikan data-data yang akurat dan solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan petani dan mendorong swasembada pangan.

"Kami sangat terbuka dan siap untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk JPNN. Oleh sebab itu, ke depan, kami mendorong agar diskusi interaktif dan konstruktif terkait pembangunan sektor pertanian ini terus dilakukan. Fraksi PKS, secara kelembagaan, senantiasa berkomitmen untuk membela kepentingan para petani lokal, mendorong peningkatan kesejahteraan petani, di saat yang sama mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah", pungkasnya mengakhiri.



"Kami sangat terbuka dan siap untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk JPNN. Oleh sebab itu, ke depan, kami mendorong agar diskusi interaktif dan konstruktif terkait pembangunan sektor pertanian ini terus dilakukan. Fraksi PKS, secara kelembagaan, senantiasa berkomitmen untuk membela kepentingan para petani lokal, mendorong peningkatan kesejahteraan petani, di saat yang sama mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah",

ADITYA

Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

Rahmat Saleh: Perjuangkan Aspirasi Peserta CPNS Gagal SKD

Jakarta (03/12) — Proses rekrutmen CPNS kembali menuai perhatian publik. Kali ini, perjuangan peserta CPNS yang gagal lolos SKD menjadi sorotan utama.

Aspirasi mereka, yang diwakili oleh Aliansi Pejuang SKB, disampaikan kepada Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Senayan, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).

Pada peserta mempertanyakan kebijakan yang menghalangi mereka melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), meskipun kuota formasi yang tersedia belum terpenuhi.

"Kuota dari kementerian dan daerah masih ada, tetapi jumlah peserta yang lolos SKD tidak mencapai kelipatan tiga dari kuota formasi yang tersedia," ungkap salah satu perwakilan Aliansi Pejuang SKB.

Menanggapi keluhan ini, Rahmat Saleh menyatakan komitmennya untuk memperju-

angkan aspirasi tersebut.

Ia menegaskan akan meminta data konkret dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta kementerian terkait.

"Data ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku," ujar Rahmat Saleh.

Menurut Rahmat, persoalan ini berbeda dengan rekrutmen PPPK, sehingga membutuhkan pendekatan khusus.

"Ini jelas isu yang berbeda dengan PPPK, dan kami akan memastikan aspirasi ini mendapat perhatian yang layak," tambahnya.

Rahmat Saleh berjanji untuk membawa persoalan ini ke Komisi II DPR RI agar menda-

patkan perhatian lebih lanjut.

"Kami akan mengusulkan agenda rapat bersama pimpinan Komisi II dan pihak terkait, tentunya setelah data yang disampaikan mendukung dan sesuai dengan peraturan," jelasnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan titik terang bagi peserta CPNS yang merasa dirugikan oleh kebijakan terkait kelulusan SKD.

Upaya Rahmat Saleh membawa aspirasi peserta CPNS ke ranah legislatif mencerminkan komitmen wakil rakyat dalam menyuarkan kepentingan masyarakat.

Banyak peserta berharap, kebijakan seleksi ke depan dapat lebih fleksibel, terutama ketika kuota formasi masih tersedia.

"Jika sistem diperbaiki dan kuota yang ada dimaksimalkan, maka lebih banyak peserta yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap SKB. Hal ini tentu akan berdampak positif pada kualitas seleksi CPNS secara keseluruhan," ungkap salah satu peserta audiensi.

Istilah kuota formasi yang tidak terpenuhi bukanlah hal baru dalam proses seleksi CPNS. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk mengatasi masalah ini agar seleksi berjalan lebih transparan dan adil.

Rahmat Saleh berharap adanya perbaikan sistem



"Jika sistem diperbaiki dan kuota yang ada dimaksimalkan, maka lebih banyak peserta yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap SKB. Hal ini tentu akan berdampak positif pada kualitas seleksi CPNS secara keseluruhan,"

H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.I.P

Anggota Komisi II DPR RI

seleksi CPNS di masa mendatang.

"Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada

solusi yang dapat diterima semua pihak, baik dari peserta, kementerian, maupun lembaga terkait," tegasnya.



image istimewa

Hadiri Malam Anugerah Kemanusiaan, Anis Byarwati Tegaskan Kemerdekaan Hak Segala Bangsa

Jakarta (08/12) --- Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) mengadakan acara Malam Anugerah Kemanusiaan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh diantaranya penceramah, Ummi Pipik, sekretaris jendral KNRP, Suhartono, dan tokoh lainnya. Hadir pula anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, yang menyampaikan sambutannya

Hal pertama yang disampaikan Anis adalah mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sejak berdirinya memiliki cita-cita luhur kemanusiaan yaitu hak kemerdekaan setiap bangsa.

Cita-cita luhur itu, kata Anis, termaktub dalam alinea pertama Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi: 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan'.

Fakta ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwa bangsa Indonesia mengutuk keras tindakan penindasan yang dilakukan Israel kepada bangsa Palestina. Menghadapi penjajahan Israel, bangsa Palestina telah lama melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang diterimanya.

"Perjuangan bangsa Pale-

stina adalah perjuangan kita semua yang peduli kepada hak asasi manusia," ungkap Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini juga mengulas tentang penindasan yang dialami bangsa Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Berbagai upaya untuk meredakan penindasan dan menghadirkan perdamaian di Palestina telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil," ungkapnya.

Intensitas perang yang semakin tinggi dalam beberapa bulan terakhir membuat rakyat Palestina hidup dalam kondisi tak menentu dan serba kesulitan. Puluhan ribu jiwa telah menjadi korban genosida, termasuk anak-anak dan perempuan.

"Pada hari ini, memasuki hari agresi Israel ke 428, tercatat jumlah korban yang gugur sebanyak 44.612 dan korban luka sebanyak 105.834 jiwa. Kondisi ini telah memicu kemarahan dari berbagai negara di dunia, termasuk kita di Indonesia," paparnya.

Politis senior PKS ini memberikan apresiasi kepada Komite Nasional untuk Rakyat

BERIKUTNYA >>>

Hadiri Malam Anugerah Kemanusiaan, Anis Byarwati Tegaskan Kemerdekaan Hak Segala Bangsa



terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saya sangat mendukung kerja-kerja KNRP," kata Anis.

Menutup sambutannya, Anis menyampaikan harapan besar kepada KNRP beserta seluruh perwakilan wilayahnya di seluruh nusantara untuk terus menguatkan barisan, mengokohkan tekad dan semangat dalam membantu rakyat Palestina. Kepada para mitra dan donatur KNRP yang hadir, Anis menyampaikan apresiasinya.

"Ini adalah kerja kita bersama, bukan saja keterpanggilan atas nama kemanusiaan dan kebangsaan, tapi juga bentuk amal kita dalam rangka mencari ridho Allah SWT.," tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina.

"Mari kita tingkatkan dukungan kita melalui berbagai inisiatif dan kegiatan, baik berupa bantuan moril maupun materil. Peran serta kita dalam menggalang donasi, menyebarkan informasi, dan mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan adalah kontribusi penting untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina.," pungkasnya.

kenal lelah terus berjuang menggalang bantuan moril dan materil dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, dan menyalurkannya kepada rakyat Palestina.

"Dukungan dan aksi solidaritas yang dilakukan KNRP adalah bentuk nyata kepedulian bangsa Indonesia

« SEBELUMNYA

Palestina (KNRP), yang sejak awal terbentuknya di tahun 2006 hingga saat ini tetap konsisten dalam perjuangannya dan menjadi salah satu lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. KNRP tanpa



"Mari kita tingkatkan dukungan kita melalui berbagai inisiatif dan kegiatan, baik berupa bantuan moril maupun materil. Peran serta kita dalam menggalang donasi, menyebarkan informasi, dan mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan adalah kontribusi penting untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina,

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**
Anggota Komisi XI DPR RI



image istimewa

Sekjend PKS: Berantas Korupsi Sejak Perencanaan

Jakarta (10/12) --- Sekjend DPP PKS, Aboebakar Alhabsy menyampaikan pentingnya peringatan hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2024.

"Ini bukan formalitas selebrasi, namun mengingatkan kembali kepada kita pentingnya semangat untuk melawan korupsi. Spirit ini penting, karena kita punya sejarah kelam soal korupsi, bahkan kita buat TAP MPR khusus soal ini", terangnya.

Lebih lanjut Aboe Bakar menyampaikan pentingnya agen-da pemberantasan korupsi ini dilakukan sejak perencanaan berbagai program pembangunan.

"Kejadian korupsi itu kan gak ada yang kecelakaan, pastinya semuanya direncanakan, makanya disebut kejahatan kerah putih. Karenanya penting sekali giat anti korupsi sudah menempel saat akan merencanakan program kerja", papar Wakil Ketua MKD lebih lanjut.

Langkah ini semakin strategis karena pemerintahan baru saja di mulai.

"Ini saat yang tepat, presiden terpilih baru membentuk kabinet, acta cita baru mulai diimplementasikan, ini sangat bagus jika diberikan pondasi anti korupsi dalam mengawal seluruh program kerja, yang dimulai dari langkah perencanaannya", papar Anggota Komisi III tersebut.

Aboe Bakar meyakini bahwa pemerintahan baru akan mengawal program antikorupsi ini dengan baik.

"Pak Prabowo itu nasionalis sejati, karakter NKRI nya kuat, dan orangnya tegas, saya yakin beliau akan mengawal seluruh program antikorupsi dengan serius", tutupnya.

"Kejadian korupsi itu kan gak ada yang kecelakaan, pastinya semuanya direncanakan, makanya disebut kejahatan kerah putih. Karenanya penting sekali giat anti korupsi sudah menempel saat akan merencanakan program kerja",

**HABIB ABOE
BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***